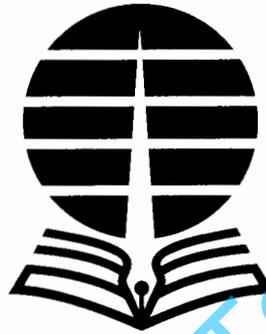


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L)
DI DESA SUNGAI MENTAWA KECAMATAN BULIK
KABUPATEN LAMANDAU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

FERY NATALIANTO

NIM: 018788135

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

FERY NATALIANTO
Universitas Terbuka
ferynatalianto@gmail.com

Pemerintah Kalimantan Tengah membuat terobosan kebijakan yang bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal yaitu Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), yang merupakan salah satu kebijakan pengentasan desa tertinggal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/ Kota.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Dalam rangka menganalisa implementasi kebijakan digunakan teori Edwards III, dengan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai acuan mengidentifikasi data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penulisan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) terhadap sejumlah informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data penelitian.

Penelitian ini ditujukan untuk: (i), Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Program PM2L di Desa Sungai Mentawa, dan (ii), Mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat kelompok sasaran pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengembangan masyarakat dan infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan PM2L di Desa Sungai Mentawa sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangannya bila ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Beberapa kendala dalam implementasi PM2L antara lain anggaran yang disiapkan untuk program tersebut masih sangat kecil, ketidaksiapan masyarakat penerima, bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat merasakan dampak positif dari pelaksanaan PM2L pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengembangan kemampuan masyarakat dan infrastruktur.

Kata Kunci: Implementasi, Partisipatif, Kearifan Lokal.

ABSTRACT

Implementation of Program Policy Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) in the village of River Mentawa District of Bulik District Lamandau

FERY NATALIANTO
Universitas Terbuka
ferynatalianto@gmail.com

Central Kalimantan government policy making inroads participatory and based on local wisdom that Mamangun Program Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), which is one of the backward villages reduction policies implemented by the Provincial and 14 District/City.

The experiment was conducted in the village of River Mentawa Lamandau District Subdistrict Bulik. In order to use the theory to analyze policy implementation Edwards III, with four (4) factors that affect the implementation of the communication, resources, disposition and structure of the bureaucracy as a reference to identify the research data. This study used a qualitative approach with the method of writing using descriptive methods. Data collection techniques such as interviews (interviews) against a number of informants were selected by purposive sampling and snowball sampling. Data were analyzed using Miles and Huberman model with triangulation techniques as a way to check the validity of the research data.

This study ditujuankan to: (i) Knowing the factors that influence the process of policy implementation program in the village of River PM2L Mentawa, and (ii), Knowing people's perceived impact on the target group aspects of education, health, income, community development and infrastructure. The results showed that PM2L Policy Implementation in the village of River Mentawa been going well, although there are few drawbacks when the review of the factors that influence the communication, resources, disposition and bureaucratic structures. Some constraints in the implementation of PM2L including budget prepared for the program is still very ketch, unpreparedness recipient communities, assistance provided is not appropriate to the situation and needs of the community.

Society could feel the positive impact of the implementation of PM2L on aspects of education, health, income, community capacity building and infrastructure.

Keywords: Implementation, Participatory, Local Wisdom.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAMP yang berjudul **Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2014

Yang Menyatakan,



FERY NATALIANTO
NIM 018788135

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Mamangun
Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai
Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Nama : FERY NATALIANTO

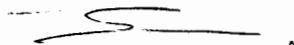
NIM : 018788135

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 24 Agustus 2014

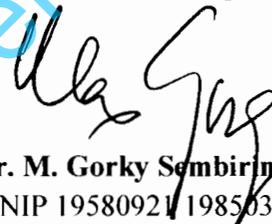
Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Sarwono, M.Si
NIP 19570909 198403 1 002

Pembimbing II,

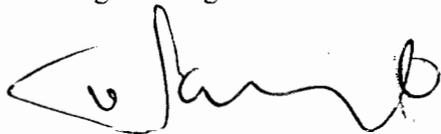


Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc
NIP 19580921 198503 1 001

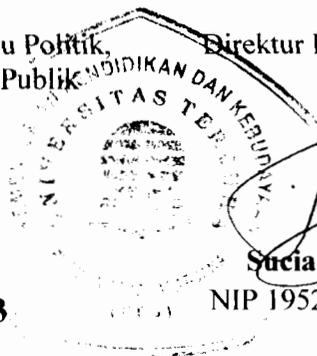
Mengetahui:

Jakarta, September 2014

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M. Sc., Ph.D
NIP 19520213 198503 2 001

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) V

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : FERY NATALIANTO
 NIM : 018788135
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
 JUDUL TAPM : **Implementasi Kebijakan Program Mamangun
Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai
Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu, 24 Agustus 2014

Waktu : 12.20 – 14.20 Wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji:

Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

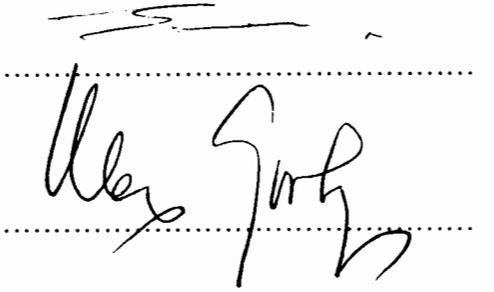


Penguji Ahli :

Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si

Pembimbing I :

Dr. Sarwono, M.Si



Pembimbing II :

Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau" dengan baik dan lancar.

Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

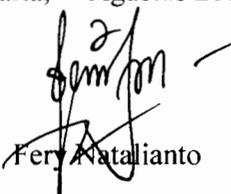
Dalam proses penulisan, saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memudahkan dalam menyelesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini peneliti ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc., Ph.D;
2. Kepala UPBJJ-UT Palangkaraya, Prof. Dr. Holten Sion selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I, Bapak Dr. Sarwono, M.Si dan Pembimbing II, Dr. M. Gorky Sembiring, M.Sc yang telah menyediakan waktu, tenaga. dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Bupati Lamandau, Ir. Marukan yang telah memberikan ijin belajar kepada saya sebagai bentuk bantuan meningkatkan mutu sumber daya manusia dilingkungan PNS Kabupaten Lamandau;
5. Sekretaris Daerah Lamandau, Drs. Arifin L.P. Umbing, M.A.P;

6. Seluruh Kepala SKPD serta warga Desa Sungai Mentawa yang terkait dalam Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kabupaten Lamandau yang telah bersedia dijadikan informan kunci yang telah banyak memberikan data dan informasi yang berharga dalam penelitian ini;
7. Orang tuaku Drs. Sander Talajan (Alm) dan Ciriwatie (Alm) serta keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;
8. Istriku tersayang Esterlia Duweshi dan anak-anakku yang tercinta, Farrel Talajan, Calvin Talajan, dan Elena Viona Meysa;
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki serta terus berkembangnya ilmu pengetahuan maka apabila penelitian ini masih belum sempurna, peneliti dengan rendah hati berterima kasih atas segala saran dan kritik demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, Agustus 2014



Fery Natalianto

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN	v
LEMBARAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Konsep Kebijakan	8
2. Kebijakan Publik	10
3. Implementasi Kebijakan	12
4. Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	14
5. Pengertian Dampak Sosial	18
B. Kajian Terdahulu	19
C. Alur Pemikiran	22

BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Pedoman Wawancara	27
E. Pemilihan Narasumber.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Analisis Data.....	32
H. Keabsahan Data.....	34
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Keadaan Geografi	39
2. Kependudukan.....	42
3. Pendidikan.....	42
4. Keagamaan.....	44
5. Mata Pencaharian.....	45
6. Pemerintahan.....	46
B. Temuan	48
C. Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1 Model Implementasi Edwards III	15
GAMBAR 2.2 Alur Pemikiran	22
GAMBAR 3.1 Tahapan Analisis Data Model Miles dan Huberman.....	34
GAMBAR 4.1 Wawancara dengan Masyarakat	50
GAMBAR 4.2 Wawancara dengan Kepala Dikjar	51
GAMBAR 4.3 Wawancara dengan Kepala Bappeda	52
GAMBAR 4.4 Wawancara dengan Bpk. Aliansyah	54
GAMBAR 4.5 Wawancara dengan Kepala BPMDes	59
GAMBAR 4.6 Pembangunan Rumah Dinas Guru	61
GAMBAR 4.7 Pembangunan Drainase	69
GAMBAR 4.8 Bantuan Bibit Karet	73
GAMBAR 4.9 Bantuan Bibit Ternak Sapi	75
GAMBAR 4.10 Rehab Rumah Warga Desa Miskin	79
GAMBAR 4.11 Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	81

DAFTAR BAGAN

	Halaman
BAGAN 4.1 Struktur Organisasi Aparatur Desa Sungai Mentawa	47

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1 Wilayah Desa Sungai Mentawa menurut Penggunaannya	41
TABEL 4.2 Penduduk Desa Sungai Mentawa menurut Jenis Kelamin	42
TABEL 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat	43
TABEL 4.4 Jumlah Sekolah di Desa Sungai Mentawa	44
TABEL 4.5 Pemeluk Agama di Desa Sungai Mentawa	45
TABEL 4.6 Sarana Ibadat	45
TABEL 4.7 Jenis Mata Pencaharian Penduduk	46
TABEL 4.8 Kegiatan PM2L Bidang Aspek Pendidikan	62
TABEL 4.9 Kegiatan PM2L Bidang Aspek Kesehatan	66
TABEL 4.10 Kegiatan PM2L Bidang Aspek Peningkatan Pendapatan	70
TABEL 4.11 Kegiatan PM2L Bidang Aspek Infrastruktur	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara	89
LAMPIRAN 2 Transkrip Wawancara	90
LAMPIRAN 3 Laporan BAPPEDA Lamandau.....	111
LAMPIRAN 4 Rencana Aksi PM2L Provinsi	119
LAMPIRAN 5 SK Gubernur Penetapan Desa PM2L	128
LAMPIRAN 6 SK Gubernur Perubahan Kedua Penetapan Desa PM2L	136
LAMPIRAN 7 SK Gubernur Penetapan Desa Tertinggal.....	145

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dinilai tidak berjalan efektif dan belum maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan.

Program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya 1) menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, biasanya dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya; 2) mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja; 3) tetap mempertahankan program lama seperti Beras Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT); 4) akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya harga beras.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuat sebuah inovasi kebijakan yaitu *Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (Program Membangun dan Memelihara Desa). PM2L dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan mensinergikan dan memfokuskan seluruh sumberdaya, termasuk program kegiatan dan pendanaan dalam program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terintegrasi dan terpadu untuk pembangunan desa tertinggal. Kebijakan program ini tidak ditujukan langsung kepada warga miskin akan tetapi dengan melakukan penguatan dan percepatan pembangunan desa yang dikategorikan tertinggal. Dengan demikian, percepatan pembangunan desa tertinggal memberi pengaruh besar bagi pengentasan warga dari kemiskinan dan memacu pertumbuhan desa/kelurahan sekitarnya.

Periode pertama, PM2L telah dilaksanakan mulai 2008 sampai dengan 2010. Dengan terpilihnya kembali Agustin Teras Narang dan Achmad Diran sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan inisiator PM2L, maka program ini dilanjutkan kembali tahun 2013- 2015. Dalam pemerintahan Teras- Diran kebijakan PM2L merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi pembangunan yakni *Menembus Isolasi Menuju Masyarakat Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat*. Keterisolasian di Kalimantan Tengah dipandang sebagai persoalan yang strategis, sekaligus merupakan tantangan yang harus ditangani dengan kesepakatan dan kebersamaan oleh seluruh pemerintahan kabupaten dan provinsi, pihak swasta, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana semua pihak dapat turut ambil bagian

dan mempunyai cara pandang bersama mengatasi persoalan keterisolasian dan mengejar ketertinggalan.

Kebijakan PM2L lahir didorong oleh masih banyaknya jumlah desa/kelurahan di Kalimantan Tengah yang dalam kondisi masih desa tertinggal, yakni sebanyak 383 desa/kelurahan atau sekitar 27,63 % dari 1.386 desa/kelurahan yang terdapat di Kalimantan Tengah. (Sumber: Laporan Monitoring Program PM2L, BPMDes 2013). Ada 5 (lima) kriteria desa penerima program PM2L yang dirumuskan oleh provinsi sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Umum PM2L, yakni: 1) masuk dalam katagori tertinggal; 2) jumlah penduduk miskin relatif tinggi; 3) jumlah penduduk, aksesibilitas dan potensi wilayah cukup memadai untuk pengembangan aktifitas ekonomi; 4) sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masih terbatas; 5) desa/kelurahan lokasi berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pusat pertumbuhan.

Dalam upaya mengatasi penanggulangan kemiskinan, sangat diperlukan proses partisipasi masyarakat miskin itu sendiri sangat penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari keterlibatan mental dan emosi, kesediaan memberi sumbangan/atau sukarela membantu, dan adanya tanggung jawab. Untuk itu, Slamet (1993) memberi pengertian bahwa “sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan yang berbeda, yakni: (1) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan; (2) pelaksanaan program-program atau proyek

secara sukarela; dan (3) pemanfaatan hasil-hasil dan suatu program atau suatu proyek.

Sebagai sebuah program pembangunan partisipatif berbasis kearifan lokal, keberadaan PM2L sebenarnya sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan sosial masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Hal ini, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai spesifikasi wilayah dan Pemerintahan, dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/78/2013 tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Maju Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012.

Pelaksanaan PM2L secara umum dilatarbelakangi minimnya pembangunan dan pemberdayaan serta dominasi fenomena kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, kurangnya kesempatan berusaha, sampai menyangkut aspek sosial dan moral masyarakat. Salah satunya adalah minimnya akses mobilitas masyarakat yaitu infrastruktur fisik berupa jalan, yang berimbas pada kurangnya kesempatan usaha bagi masyarakat. Terbatasnya akses masyarakat tidak dapat dipungkiri membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka implementasi kebijakan dari Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/192/2012 tentang penetapan Desa/Kelurahan lokasi PM2L tahun 2013-2015, salah satu desa sasaran

program ini adalah Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Di Desa Sungai Mentawa, jalan merupakan akses utama dalam mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan bagi masyarakat desa yang memiliki mata pencarian sebagai petani. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Mentawa merupakan program yang sangat tepat dalam mendukung tercapainya tujuan Program Membangun dan Menjaga Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi PM2L sebagai sebuah program Pemerintah yang *bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan semua unsur terkait, namun tidak disediakan anggaran secara khusus*. Hal inilah yang menarik untuk diteliti, apakah implementasi kebijakan program ini berhasil mencapai tujuan atau sebaliknya gagal meraih tujuan yang diinginkan.

Sebuah program kebijakan diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan ke depan dapat membawa manfaat bagi masyarakat desa dan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Namun dari hasil observasi awal, secara fisik Desa Sungai Mentawa dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang belum sepenuhnya terjamin oleh adanya kebijakan program PM2L, terutama jika diamati dari segi infrastruktur jalan. Peneliti dapat mendeskripsikan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Desa Sungai Mentawa adalah jalan tanah yang pada saat musim hujan kondisinya licin dan menghambat akses masyarakat menuju ke luar atau pun masuk ke desa. Selain itu, Desa Sungai Mentawa yang terdiri dari 3 (tiga) RT hanya memiliki 2 (dua) fasilitas kesehatan dan 2 (dua) fasilitas pendidikan yang bisa diterima oleh masyarakat. Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik

untuk meneliti implementasi kebijakan program PM2L di Desa Sungai Mentawa sesuai dengan faktor-faktor yang dikemukakan oleh Edwar III, yaitu dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi selama proses pelaksanaan program PM2L.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis mengajukan judul Tugas Akhir Program Magister sebagai berikut: "Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Program PM2L di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau?
2. Bagaimana dampak sosial PM2L pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengembangan masyarakat, dan infrastruktur di Desa Sungai Mentawa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah penelitian, dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Program PM2L di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.

2. Mengetahui dampak sosial pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengembangan masyarakat, dan infrastruktur di Desa Sungai Mentawa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Berikut ini beberapa manfaat teoritis dan praktis dari penulisan tesis “Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau”.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan publik dalam bentuk PM2L di Provinsi Kalimantan Tengah yang bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah (Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lamandau) untuk melihat keberhasilan atau kendala pelaksanaan PM2L di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah berhak mengatur roda pemerintahan dan rakyat berkewajiban mematuhi aturan-aturan tersebut. Aturan-aturan dan keinginan rakyat tersebut diwujudkan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan publik, dalam bentuk tindakan apapun yang dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah, baik untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berarti bahwa tindakan Pemerintah melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan bentuk kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah karena apapun pilihan bentuk kebijakannya akan tetap menimbulkan dampak yang sama besarnya.

Secara umum, istilah “kebijakan” sebagai terjemahan dan kata “*policy*” digunakan untuk menunjuk pelaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga Pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2007). Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Nurcholis, 2005: 158), Kebijakan dijelaskan sebagai konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang Pemerintah, organisasi dan sebagainya).

Adapun Kebijakan menurut para pakar sebagaimana dirangkum oleh Islamy (Kismartini, dkk., 2011: 1, 4), sebagai berikut:

- a. Laswell dan Kaplan (1970) mengartikan kebijakan sebagai suatu program, pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
- b. Friederick (1966) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- c. Anderson (1979) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- d. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
 - 2) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - 3) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Kismartini, dkk. (2011: 1, 4) mengambil benang merah dari definisi yang disebutkan oleh berbagai pakar ada beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*)
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan semula. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang seringkali dijabarkan dalam bentuk program dan proyek-proyek.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar Pemerintahan.
- d. Penyediaan *input* untuk melaksanakan strategi. *Input* berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

2. Kebijakan Publik

Dalam perkembangannya kata publik mengalami pergeseran makna dari Negara atau Pemerintah menjadi umum atau masyarakat. Kismartini, dkk. (2011: 1, 6), menekankan satu hal terpenting bahwa kata publik harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat.

Pengertian kebijakan publik memiliki definisi yang cukup beragam namun oleh Islamy didalam *Analisis Kebijakan Publik* yang ditulis oleh Kismartini, dkk (2011: 1, 6), mengklasifikasikan menjadi 3 (tiga) sudut pandang :

- a. Kebijakan Publik dipandang sebagai tindakan Pemerintah, Dye (1978: 3). mengemukakan kebijakan publik sebagai:

“Kebijakan Publik sebagai apa pun pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.”

Senada dengan pandangan Dye diatas adalah Edward III dan Sharkansky (1987: 2):

Kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam polcy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wancana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat Pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan Pemerintah.

Sedangkan menurut Anderson (1979: 3):

“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat Pemerintah.”

- b. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan Pemerintah:

Menurut Laswell dan Kaplan (1970):

“Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.”

Sedangkan Easton (1953: 129), mengatakan:

“Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.”

- c. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan Pemerintah untuk mencapai tujuan.

Anderson (1979: 3):

“Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat Pemerintah.”

Edward III dan Sharkansky (1987):

“Kebijakan publik adalah suatu tindakan Pemerintah yang berupa program-program Pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan.”

Berdasarkan beberapa konsep kebijakan publik di atas, maka pada dasarnya konsep-konsep kebijakan publik tersebut memiliki persamaan.

Persamaan tersebut adalah bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan diwujudkan dalam program-program ataupun keputusan-keputusan. Tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat atau badan-badan yang berada dalam lingkungan pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Mengacu kepada konsep di atas dapat ditegaskan bahwa program PM2L merupakan sebuah Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang secara umum bertujuan memberantas kemiskinan. Hanya saja program ini diangkat dari budaya lokal maka sifat kebijakan bisa dikatakan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan semua pihak, baik instansi Pemerintah maupun *stakeholders* lainnya.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi (*implementation*) dipergunakan untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah setelah kebijaksanaan Pemerintah itu di buat atau diformulasikan.

Konsep implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 4) adalah sebagai berikut:

Di dalam mempelajari masalah implementasi kebijaksanaan berarti berusaha untuk memahami "apa" yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada saat masyarakat atau pun peristiwa.

Van Mater dan Van Horn (1975: 447) mendefinisikan:

“Policy implementasi encompasses those action by publik and private individuals (and group) that are directed at the achievement of goals and objective set forth in prior policy decisions” (Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) Pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).

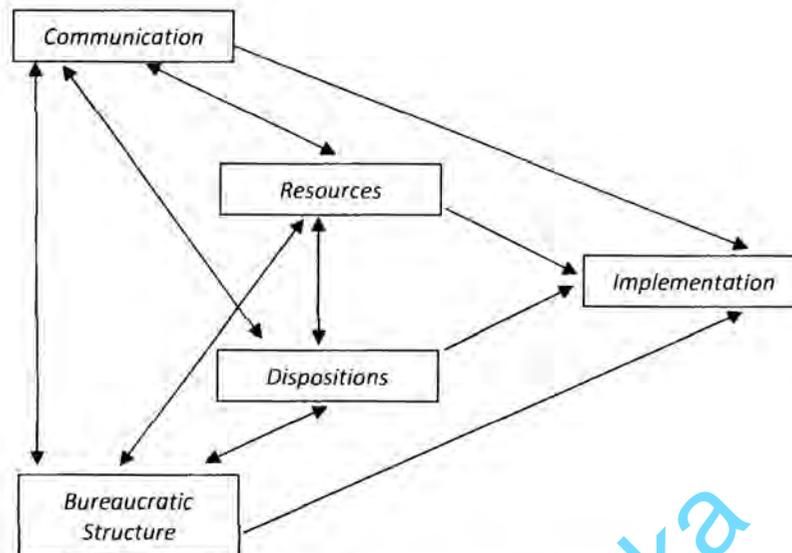
Berdasarkan pendapat diatas nampak bahwa implementasi kebijakan tidak terbatas pada tindakan atau perilaku badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dan target group, namun lebih jauh dari itu juga berpengaruh pada penjangkauan pada kekuatan politik, sosial, ekonomi yang berpengaruh pada perilaku pihak yang terlibat pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan.

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/ akibat terhadap suatu konsep implementasi diatas memberikan pengertian bahwa implementasi diatas memberikan bahwa implementasi dampak terhadap sesuatu yang merupakan obyek, Pengertian ini diperkuat oleh Winarno (2007) menyampaikan pendapat Ripley dan Franklin (1986) tentang definisi implementasi adalah apa yang terjadi setelah pelaksanaan undang-undang di tetapkan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), sedangkan Grindle (1980) dalam Winarno (2007) memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengalihan arah tindakan kebijakan sampai dicapai sebuah hasil kebijakan dalam pelaksanaan implementasi.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksana dan pengendalian arah tindakan atau kebijakan sebagai pelaksana program PM2L yang harus dicapai sebagai hasil kebijakan. Untuk menerapkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini ialah rangkaian dan suatu proses kebijakan sesudah perumusan kebijakan ditetapkan maka selanjutnya diikuti dengan implementasi atau pelaksanaan kebijakan (Dunn, 1995). Adapun Proses pelaksanaan kebijakan pada tesis ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/192/2012 tentang Desa/Kelurahan lokasi PM2L di Kalimantan Tengah terhadap salah satu sektor informal yakni Pembangunan di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian.



Gambar 2.1. Model Implementasi Edwards III

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menganalisis implementasi kebijakan program PM2L di Desa Sungai Mentawa adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980). Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dibagi menjadi dua faktor yaitu:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menyebabkan implementasi itu tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Winarno (2012: 178) menyampaikan bahwa menurut Edwards III, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dengan demikian komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Keberadaan sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah keberadaan staf (sumber daya manusia) yang memadai dan memiliki kecakapan yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan dalam menjalankan kebijakan.

Hal penting lainnya yang perlu dicermati pada faktor disposisi adalah pengangkatan birokrat dan ketersediaan insentif bagi para pelaksana kebijakan (implementor). Ketersediaan insentif bagi para implementor dimaksudkan agar menjadi faktor pendorong bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.

Faktor terakhir yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama yang baik dan efektif. Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika struktur birokrasi tidak kondusif. Agustino (2008: 153) menjelaskan bahwa menurut Edwards III untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedurs (SOPs)* dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah standar yang ditetapkan untuk suatu kegiatan rutin tertentu yang dilakukan oleh pegawai untuk dilaksanakan setiap hari. Sedangkan Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Sesuai dengan konsep diatas, implementasi kebijakan program PM2L ada upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah agar kegiatan dan program sejalan, oleh sebab itu apabila dalam kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang berurutan, maka implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini bahwa implementasi kebijakan tidak hanya di lakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Mengingat program PM2L dilaksanakan yaitu pada tahun 2013 dan berakhir tahun 2015 untuk 3 (tiga) tahun terakhir, maka secara faktual penelitian ini dilaksanakan pada saat program tengah berjalan. Artinya penelitian ini sedang mencari apa yang menjadi implementasi dari sebuah kebijakan konsekuensi-konsekuensi dan menilai hasil kebijakan berupa

manfaat yang dirasakan pada masyarakat sasaran setelah PM2L berjalan sampai akhir tahun 2015. Sebagai sebuah kebijakan publik dan PM2L dijalankan dengan maksud tertentu dan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, yakni menanggulangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pengertian Dampak Sosial

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dalam konteks sosial bila pengaruh kuat tersebut mendatangkan akibat negative maka akan menyebabkan permasalahan sosial. Sedangkan bila sebaliknya, berarti meniadakan permasalahan sosial.

Soetomo (2008: 1) menjelaskan bahwa pada umumnya masalah sosial ditafsir sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku.

Dalam arti lain kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* merupakan pemicu masalah sosial. Sedangkan Daljuni yang dikutip Abdulsyani (2001: 184) mendefinisikan masalah sosial adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang berseumber dari dalam masyarakat sendiri dan membutuhkan pemecahan dengan segera, dan sementara itu oleh masih percaya akan masih dapatnya masalah itu dipecahkan.

B. Kajian Terdahulu

1. Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2010 oleh Marline (2012).

Kebijakan PM2L melibatkan banyak pihak dan kepentingan, yakni terdapat Pemerintah provinsi, 14 kabupaten/kota beserta perangkat daerah didalamnya, sampai dengan level Pemerintahan yang paling bawah yakni kecamatan, desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana konten dan konteks kebijakan mempengaruhi pelaksanaan PM2L dalam mewujudkan tujuannya; dan
- b. Untuk mengetahui hubungan antara konten dan konteks kebijakan PM2L mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan desa tertinggal di Kalimantan Tengah.

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan PM2L.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan PM2L selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih belum optimal dalam mewujudkan tujuannya, ditunjukkan dengan masih adanya program kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; pemberian bantuan/kegiatan tanpa bimbingan/ pembinaan; tingkat partisipasi SKPD dan kualitas pelaksanaan menurun; masih ada terdapat kegiatan yang saling tidak menunjang/melengkapi sebagai tanda koordinasi antara level Pemerintah dan level sektoral, mengandung beragam kepentingan dari

aktor-aktor dimaksud. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan dan dalam dinamikanya menunjukkan penting adanya kesepahaman atas ide kebijakan dan perlu terjalannya komunikasi dan koordinasi diantara para actor yang terlibat. Sehingga dengan kesepahaman dimaksud, spirit program dapat dijiwai dengan baik oleh semua actor. Dengan demikian memandang program ini bermanfaat untuk kepentingan daerah. Komunikasi dapat menjembatani perbedaan kepentingan yang berpotensi konflik, dapat mengurangi kesalahan dan mengatasi kendala yang dihadapi secara bersama dan terpadu. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlangsungan pelaksanaan PM2L diperlukan adanya peraturan daerah yang mendasari dan mengatur, sekaligus memperbaiki desain pelaksanaan kebijakan ini. Dengan peraturan daerah dapat dibangun kesepahaman dan menjadi komitmen bersama antara Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan desa di Kalimantan Tengah.

2. Evaluasi PM2L di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya oleh Zulhikmah (2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsekuensi program PM2L di Kelurahan Tanjung Pinang terhadap keterlibatan instansi-instansi Pemerintah daerah dan stakeholder setempat.
- b. Bagaimana hasil yang dirasakan masyarakat sasaran atas pelaksanaan program PM2L pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan kemampuan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang?

Penelitian ini bertujuan menilai, menganalisis dan mendeskripsikan konsekuensi-konsekuensi dan hasil yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan PM2L di Kelurahan Tanjung Pinang berupa:

- a. Keterlibatan instansi-instansi Pemerintah daerah dan *stakeholders* setempat dalam pelaksanaan program PM2L di Kelurahan Tanjung Pinang.
- b. Hasil yang dirasakan kelompok sasaran pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

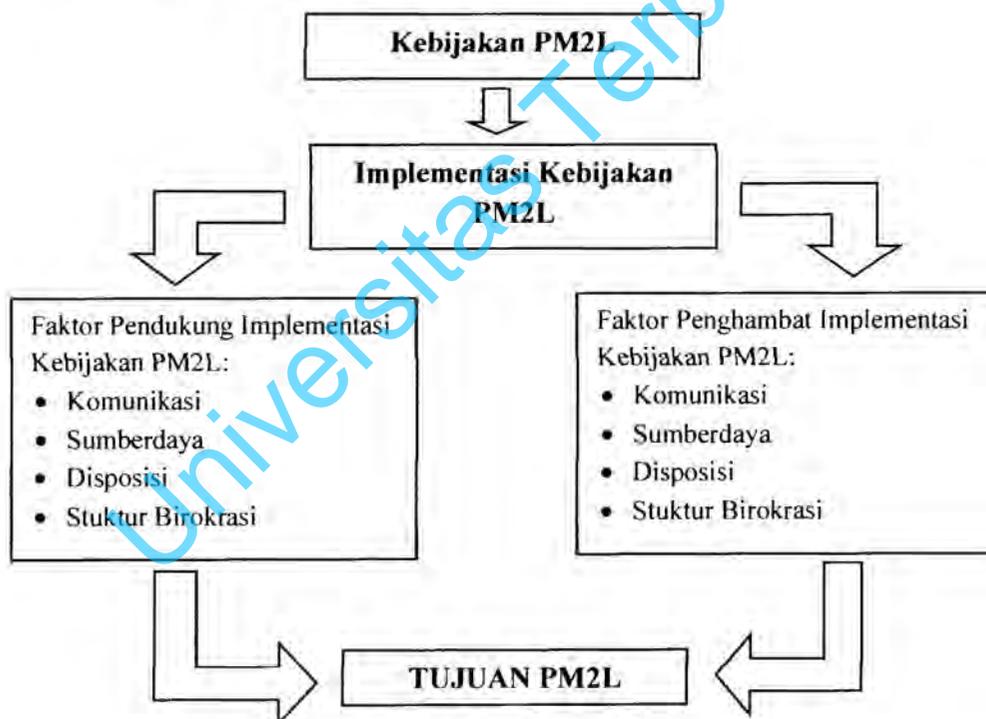
- a. PM2L yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Pinang melahirkan konsekuensi nyata berupa keterlibatan beberapa instansi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya, namun belum mampu melibatkan sector swasta (*privat sector*) dan masyarakat (*society*) sebagai actor pembangunan.

b. Berdasarkan penilaian masyarakat, PM2L berdampak positif kepada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan kemampuan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PM2L juga berlangsung pada pembangunan infrastruktur fisik dan ternyata hal ini dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya kelompok sasaran tetapi juga masyarakat

C. Alur Pemikiran

Untuk memudahkan analisis hasil penelitian, maka dibutuhkan sebuah alur pemikiran yang sistematis, sebagai berikut:



Gambar 2.3. Alur Pemikiran

Sebagai sebuah kebijakan publik, PM2L dalam prosesnya telah diformulasikan dan untuk mencapai sarannya harus diimplementasikan.

PM2L bertumpu pada keterpaduan dari pada Pemerintah Daerah (Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lamandau), Pihak Swasta dan Masyarakat terdiri atas individual atau kelompok yang terorganisir atau tidak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Semua unsur tersebut merupakan domain yang secara konseptual terlibat dalam pelaksanaan PM2L di desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

Dalam menganalisa implementasi terhadap kebijakan program PM2L yang bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal, berdasarkan pendekatan Edwards III dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Variabel tersebut yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan hal yang penting agar sebuah penelitian yang dilakukan lebih terarah dan bias mencapai sasaran yang diinginkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dari pelaksanaan kebijakan program PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik. Alasan mendasar menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang berkenaan dengan program bersifat kualitatif dan mungkin saja diantara individu-individu kelompok sasaran merasakan dampak yang berbeda.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2010: 4) yang menyatakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2010: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari apa-apa saja yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan selama melakukan penelitian

implementasi kebijakan program PM2L di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data secara sistematis. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Penulis mengumpulkan data penelitian dari rekaman wawancara, foto, pengamatan di lapangan, arsip-arsip dan dokumen resmi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling*, yaitu dari responden yang sudah ditentukan penulis menelusuri responden lainnya, dan *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Sungai Mentawa yang berada di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti menentukan lokasi tersebut dengan pertimbangan Desa Sungai Mentawa merupakan salah satu lokasi sasaran PM2L Tahun 2013, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Alasan lainnya adalah Desa Sungai Mentawa mempunyai jarak cukup dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Lamandau, yaitu 17 km. Namun perkembangan desa secara ekonomi masyarakat dan pembangunan masih rendah. Desa Sungai Mentawa juga masih tergolong desa tertinggal ini bias dilihat dari jalan utama desa ke Kabupaten masih tanah kuning, MCK/jamban masih disungai, sarana air bersih belum ada, pasar desa tidak

ada, sumber penghasilan penduduk bertani/ pendapatan masih rendah. (SK. Gubernur Nomor. 188.44/ 78/ 2013 tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Maju). Masyarakat desa mayoritas muslim, hanya 1,5 % yang non muslim terdiri dari berbagai suku dan pemeluk agama serta jenis pekerjaan masyarakat yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini secara sosiologis diprediksi ikut berpengaruh dan terpengaruh manakala kepada mereka diturunkan sebuah program pembangunan berbasis kearifan lokal sebagaimana halnya PM2L.

C. Sumber Data

Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian kualitatif, sumber daya utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamandau
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau
7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
10. Camat Bulik

11. Kepala Desa Sungai Mentawa
12. Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa Sungai Mentawa
13. Ketua-ketua Rukun Tetangga di Desa Sungai Mentawa
14. Tokoh-tokoh masyarakat
15. Warga sasaran program PM2L.

Selama proses penelitian berlangsung tidak menutup kemungkinan ada tambahan narasumber yang baru, rekomendasi dari narasumber tersebut untuk mendapatkan data penelitian yang lengkap dan akurat.

Selain sumber data primer, digali pula data sekunder berupa profil Desa, laporan-laporan, foto-foto, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan tema penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder berupa:

1. Foto rencana aksi kegiatan program PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.
2. Jumlah program kegiatan PM2L yang masuk di Desa Sungai Mentawa.
3. Dokumen resmi terkait dengan Implementasi PM2L (SK Penetapan Desa PM2L, Rencana Aksi Provinsi dan Rencana Aksi Kabupaten beserta Anggarannya).

D. Pedoman Wawancara

Adi (2005: 42) menjelaskan bahwa wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun tidak langsung (mengirim daftar pertanyaan dalam

bentuk tertulis). Berikut ini pedoman wawancara yang dilakukan pada saat penelitian:

1. Melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:
 - a. Berpakaian rapi dan sopan
 - b. Membuat daftar calon responden yang akan dikunjungi, jadwal berkunjung dan alamat calon responden
 - c. Memeriksa kelengkapan alat bantu wawancara seperti pulpen, pensil, buku catatan, alat perekam wawancara, kamera dan lembaran panduan pertanyaan peneliti. (daftar panduan pertanyaan peneliti dapat dilihat pada Lampiran I)
 - d. Memastikan alat perekam bisa bekerja normal dengan mencobanya terlebih dahulu dan
 - e. Memastikan alat perekam memiliki daya yang cukup untuk digunakan selama mengumpulkan data lapangan.
2. Ketika menemui responden dimulai dengan salam dan senyum.
3. Sampai maksud dan tujuan penelitian setelah sebelumnya memperkenalkan diri kepada responden.
4. Bersikap dan bertingkah laku sopan selama mewawancarai responden.
5. Tidak melakukan pemaksaan apabila responden menolak untuk diwawancarai, namun jika responden adalah sumber data penting tidak ada salahnya membujuk dan menemuinya pada kesempatan yang lain.
6. Memohon ijin terlebih dahulu untuk merekam pembicaraan selama wawancara dengan memberi penjelasan terlebih dahulu bahwa hasil rekaman hanya untuk kepentingan penelitian.

7. Menjadi pendengar yang baik, tetap fokus pada daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas saat wawancara dilakukan.
8. Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan meminta kesediaan responden untuk diwawancarai kembali dikemudian hari.
9. Tidak reaktif menanggapi apabila mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat dilingkungan sekitar lokus penelitian.
10. Menggunakan bahasa daerah setempat (informal) selama wawancara untuk memudahkan wawancara dan kedekatan emosional terhadap responden yang berasal dari masyarakat awam.

Selama melakukan wawancara, alat bantu rekam audio yang digunakan oleh peneliti adalah *Handphone Android Advan S5J* dengan menggunakan format perekam dalam format audio mp4 dan mp3. Sedangkan dalam pengambilan dokumentasi visual berupa foto dengan format Jpeng, peneliti menggunakan *Handphone Android Advan S5J* dengan lensa 8 MP dengan kapasitas memori internal 2,5 GB dan memori eksternal 2 GB. Dan sebuah kamera Samsung dengan lensa 8 MP dengan memori eksternal 4 GB. Selain itu setelah wawancara usai segera pada hari itu juga melakukan pemindahan data-data lapangan dari *handphone* dan *camera* kedalam *kompute/notebook* untuk berjaga-jaga dari kehilangan data yang tidak kita duga, misal *handphone* rusak, hilang atau dicuri orang. Kemudian segera mentranskrip data wawancara yang masih berupa audio kedalam teks sesegera mungkin sesuai wawancara mengingat terkadang hasil rekaman ada yang tidak jelas

terdengar. Dengan melakukannya sesegera mungkin tentu apa yang tidak jelas terdengar dalam rekaman tersebut masih dapat diingat-ingat dan dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat selama melakukan wawancara.

E. Pemilihan Narasumber

Teknik pemilihan narasumber yang digunakan penulis adalah teknik *Snowball Sampling*, yaitu responden yang sudah ditentukan penulis menelusuri responden lainnya, dan *Purposive Sampling*, yaitu penentuan narasumber yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian memilih narasumber yang terkait dari masyarakat dan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Pemilihan narasumber dilakukan kepada instansi yang dianggap terkait dengan mengetahui proses Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai Mentawa. Sedangkan dari masyarakat yang dipilih adalah masyarakat tujuan program sasaran PM2L. Untuk mendapatkan informan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang berasal dari masyarakat ada baiknya meminta informasi dari Kepala Desa sebagai informan awal. Karena Kepala Desa mengetahui siapa saja warganya yang mendapatkan bantuan program PM2L dan bentuk bantuannya apa saja dari pemerintah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. **Observasi.** Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting dalam penelitian ini karena beberapa kegiatan dan hasil PM2L berupa fisik dan kegiatan nyata lainnya. Pengamatan digunakan karena menurut Jorgensen (dalam Mulyana, 2004) metode pengamatan berperan serta dapat didefinisikan berdasarkan tujuh ciri sebagai berikut: minat khusus pada makna dan interaksi manusia berdasarkan perspektif orang-orang dalam atau anggota-anggota situasi dan keadaan tertentu, pondasi penelitian dan metodenya adalah kedirian dan kekinian kehidupan sehari-hari, bentuk teori dan penteroran yang menekankan interpretasi dan pemahaman eksistensi manusia, logika dan proses penelitian yang terbuka, luwes, *opportunistic*, dan menuntut redefinisi apa yang *problematic*, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam situasi nyata eksistensi manusia, pendekatan dan rancangan yang mendalam, kualitatif, dan studi kasus, penerapan peran partisipan yang menuntut hubungan langsung dengan pribumi lapangan, penggunaan pengamatan langsung bersama metode lainnya dalam mengumpulkan informasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung pelaksanaan PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- b. **Wawancara.** Wawancara adalah percakapan dengan maksud mendapatkan data dan informasi berkenaan dengan konsekuensi-konsekuensi dan dampak yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok sasaran PM2L. Sesuai teori, wawancara dilakukan oleh

2 (dua) pihak, yaitu pewawancara (dalam hal ini peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan subyek (sumber informasi) yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Wawancara dilakukan dengan semua sumber data sebagaimana dikemukakan terdahulu.

- c. **Studi Dokumentasi.** Studi dokumenter dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Kantor Desa Sungai Mentawa ataupun yang berada di luar Kantor Desa Sungai Mentawa, yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Berbagai dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian dikaji karena menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2010) (a) dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (b) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (c) berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks; (d) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktifitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data ini menggunakan Model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dilakukan secara *continue* hingga data menjadi jenuh. Adapun analisa data yang dilakukan di dalam penelitian sebagaimana diatas yang dikembangkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang sangat sukar diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan dan memiliki validitas tinggi. Data yang diperoleh lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Data-data yang didapat lapangan berupa catatan dirangkum kembali dengan fokus kepada hal-hal yang penting.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Data-data yang didapat lapangan berupa catatan dirangkum kembali dengan fokus kepada hal-hal penting.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

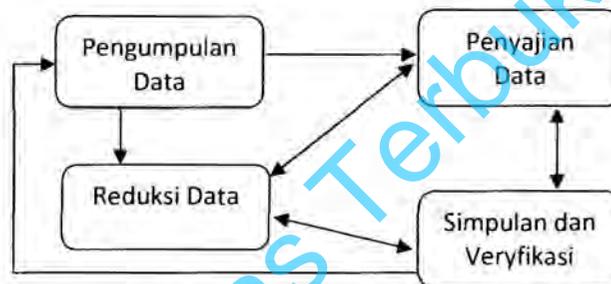
Setelah melakukan reduksi data, kemudian peneliti melakukan display data. Melalui display data bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian dan mengidentifikasi data penelitian dari beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian. Untuk penyajian data penelitian yang telah diperoleh di lapangan di sajikan dalam bentuk tabel yang akan diinterpretasikan secara naratif.

4. Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah peneliti melakukan penyajian data yang diinterpretasikan, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dengan melakukan verifikasi sebagai upaya oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid dengan derajat kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi bila masih ditemukan bukti-bukti yang belum kuat oleh peneliti terus menggali informasi data yang lebih jelas sehingga diharapkan kedepannya kesimpulan penelitian akan dapat dipercaya dan valid.

Berikut visualisasi tahapan analisis data Model Miles dan Huberman selama penelitian berlangsung:



Gambar 3.1 Tahapan Analisis data Model Miles dan Huberman (Sumber: Miles & Huberman. 1994: 12)

H. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Sesuai dengan pendapat Denzin dalam Moleong (2010), triangulasi dibedakan atas 4 macam yakni:

1. Triangulasi Sumber,

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara:

- a) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara,
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang,
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ialah pengecekan keabsahan data dengan menggunakan dua strategi, yaitu:

- a) Pengecekan derajat kepercayaan data temuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data,
- b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Menggunakan Penelitian

Triangulasi dengan jalan menggunakan penelitian yang berbeda merupakan salah satu upaya untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data.

Misal, dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang peneliti dengan peneliti lainnya.

4. Triangulasi Menggunakan Teori

Triangulasi yang dilakukan dengan mengkonfirmasi fakta tertentu dengan dua teori atau lebih.

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan PM2L Di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi menggunakan sumber. Hal ini dilakukan karena peneliti terdiri dari 1 (satu) orang bukan terdiri dari beberapa orang dan dirasa paling mudah pelaksanaannya.

Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif wilayah Kabupaten Lamandau yang luasnya 6.414 km², pada awal berdirinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Delang, dan 3 (tiga) Kelurahan dan 82 (delapanpuluh dua) Desa. Dengan perkembangan pemerintah maupun tuntutan pada pelayanan masyarakat maka dirasa perlu untuk memekarkan kembali wilayah administratif tingkat Kecamatan pada tanggal 1 Agustus 2005 menjadi 8 (delapan) kecamatan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Mentobi Raya, Sematu Jaya, Belantikan Raya dan Batang Kawa. Adapun wilayah kecamatan, desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Lamandau berdasarkan Perda dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bulik dengan luas 665,55 km² yang terbagi menjadi 1 (satu) kelurahan dengan pusat kecamatan di Kelurahan Nanga Bulik dan terdiri dari 11 (sebelas) desa, yaitu Sungai Mentawa, Bunut, Batu Kotam, Guci, Kujan, Bumi agung, Sumber Mulya, Bukit Indah, Arga Mulya, Beruta dan Tamiang.

- b. Kecamatan Lamandau dengan luas 1.333 km² yang terbagi menjadi 1 (satu) Kelurahan Tapin Bini dan 9 (sembilan) desa yaitu Cuhai, Kawa, Penopa, Suja, Sekoban, Bakonsu, Karang Taba, Tanjung Beringin dan Sungai Tuat.
- c. Kecamatan Delang dengan luas 685 km² yang terbagi menjadi 1 (satu) kelurahan dengan pusat kecamatan di Kelurahan Kudangan dan terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu Riam Panahan, Sepoyu, Riam Tinggi, Landau Kantu, Nyalang, Lopus, Kubung, Sekombulan dan Penyombaan.
- d. Kecamatan Batang Kawa dengan luas 685 km² yang terbagi dengan pusat kecamatan di Desa Kinipan dan terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu Kinipan, Ginih, Batu Tambun, Benakitan, Liku, Mengkalang, Karang Mas, Kina dan Jemuat.
- e. Kecamatan Sematu Jaya dengan luas 86,85 km² dengan pusat kecamatan di Desa Purwareja dan terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu Purwareja, Bina Bhakti, Tri Tunggal, Wonorejo, Jangkar Prima, Mekar Mulya dan Batu Hambawang.
- f. Kecamatan Mentohi Raya dengan luas 620,88 km² yang terbagi menjadi 11 (sebelas) desa yaitu Lubuk Hiju, Batu Ampar, Topalan, Nanuah, Modang Mas, Bukit Manunggal, Melata, Bukit Makmur, Bukit Raya, Sumber Jaya dan Bukit Harum dengan pusat kecamatan di Desa Melata.
- g. Kecamatan Bulik Timur dengan luas 1.072,72 km² yang terbagi menjadi 12 (dua belas) desa yaitu Marambang, Batu

Tunggal, Pedongatan, Nuangan, Sungkup, Nanga Koring, Toka, Sepondam, Nanga Kemujan, Nanga Palikodan, Bukit Jaya dan Suka Maju. Dengan pusat kecamatan di Desa Merambang.

- h. Kecamatan Belantikan Raya dengan luas 1.263 km² yang terbagi menjadi 12 (dua belas) desa yaitu Bayat, Nanga Bealantikan, Sungai Buluh, Belibi, Karang Besi, Benuatan, Kahingai, Nanga Matu, Petarikan, Sumber Cahaya, Bintang Mengalih dan Tangga Batu. Dengan pusat kecamatan di Desa Bayat.

1. Keadaan Geografi

Desa Sungai Mentawa adalah satu dari 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Bulik yang terletak pada posisi $1^{\circ}20^{\circ}$ - $2^{\circ}30^{\circ}$ Lintang Barat dan $5^{\circ}40^{\circ}$ - $7^{\circ}20^{\circ}$ Bujur Timur berada pada ketinggian antara 40-70 m diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 3,487 mm/tahun dengan suhu rata-rata 32 °C. Topografi Desa Sungai Mentawa termasuk dalam golongan daerah dataran berombak, terdiri dari tanah Podsoik Merah Kuning yang tahan terhadap erosi.

Secara administrasi batas-batas Desa Sungai Mentawa dengan luas wilayah sebesar 102 km² dengan batasan, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Beruta Kecamatan Bulik
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
- c. Sebelah Selatan : Desa Bunut Kecamatan Bulik

d. Sebelah Barat : Desa Suja Kecamatan Lamandau

Jarak Desa Sungai Mentawa dengan Pusat Pemerintahan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Kota Kecamatan Bulik = 17 Km
- b. Pusat Kota Kabupaten Lamandau = 17 Km
- c. Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah = 517 Km

Waktu tempuh Desa Sungai Mentawa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Bulik sangat dekat yaitu 17 Km dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan/kabupaten dengan kendaraan bermotor adalah 30 menit pada musim kemarau. Akan tetapi pada musim penghujan waktu yang ditempuh akan relatif sangat lama dari biasanya. Hal ini disebabkan, jalan darat yang digunakan sangat banyak kerusakan diakibatkan penggunaan jalan melebihi kapasitas. Selain itu jalan desa adalah jalan tanah yang pada saat musim hujan kondisinya licin serta menghambat akses masyarakat menuju ke luar atau pun masuk ke desa. Akibat terjadinya kerusakan jalan dimana-mana maka jarak tempuh yang digunakan sangat lama. Bahkan menuju pusat pemerintah jauh lebih lama lagi, yaitu sekitar 13 (tiga belas) jam menggunakan transportasi darat.

Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik adalah desa lokal yang terletak di bantaran Sungai Lamandau yang umurnya lebih dari 100 tahun. Dari semenjak dahulu penduduk desa menggantungkan hidupnya dengan cara bertani dan mencari ikan. Penduduk desa terdiri dari suku Melayu dan Dayak.

Luas lahan di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik adalah 1.944 Ha yang di gunakan untuk pemukiman, perkebunan, sawah, ladang, perkantoran, sekolah, rumah ibadat, makam, serta prasarana lainnya. Tabel wilayah desa menurut penggunaannya dapat kita lihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Wilayah Desa Sungai Mentawa Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan Tanah	Luas Areal (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman Umum	15 Ha	0,78 %
2.	Perkebunan Plasma	690 Ha	35,49 %
3.	Kuburan (makam)	1 Ha	0,05 %
4.	Pekarangan	15 Ha	0,78 %
5.	Perkantoran	1 Ha	0,05 %
6.	Lapangan Olah Raga	1 Ha	0,05 %
7.	Tegal/Ladang	300 Ha	15,43 %
8.	Rawa-rawa	100 Ha	5,14 %
9.	Perkebunan Swasta	500 Ha	25,72 %
10.	Situ/waduk/danau	1 Ha	0,05 %
11.	Sawah	100 Ha	5,14 %
12.	Prasarana umum lainnya	220 Ha	11,32 %
	JUMLAH	1.944 Ha	100 %

Sumber : Profil Desa Sungai Mentawa Tahun 2013

Tabel diatas menggambarkan bahwa sebagian besar lahan sudah diperuntukan perkebunan swasta dan perkebunan kemitraan berupa plasma kelapa sawit, sehingga cakupan daripada sisa tanah desa hanya untuk pemukiman dan bangunan lainnya dan relatif sedikit jumlahnya, terlebih lahan yang digunakan untuk kegiatan ladang sudah hampir sedikit berkisar 300 Ha.

2. Kependudukan

Penduduk Desa Sungai Mentawa sebanyak 571 jiwa menurut sumber data kependudukan tahun 2013 dan terdiri dari atas berbagai suku, seperti Suku Melayu, Dayak, Jawa, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan umumnya adalah bahasa Indonesia.

Tabel 4.2 Penduduk Desa Sungai Mentawa menurut Jenis Kelamin

No	Jenis RT	KK	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1	RT I	58 KK	102 orang	86 orang	188 orang
2.	RT II	46 KK	82 orang	86 orang	168 orang
3.	RT III	64 KK	120 orang	95 orang	215 orang
Jumlah		168 KK	267 orang	267 orang	571 orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2013

Masyarakat Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik pada hakekatnya manusia menggunakan adat dan budaya yang berasal dan nenek moyang, keterikatan masyarakat kepada adat warisan nenek moyang dapat dilihat dalam upacara perkawinan, kelahiran, kematian dan kesenian tradisional daerah berupa tari-tarian.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan sikap ramah serta selalu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik timbul dalam keluarga maupun dalam urusan kemasyarakatan

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak dalam hal pelaksanaan PM2L di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sasaran pada

desa yang tertinggal agar dapat ditumbuhkembangkan Sumber Daya Manusia yang handal sebagai penerus bangsa yang akan datang, generasi muda merupakan penjabaran salah satu harapan bangsa atau tunas bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat penting yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini, berdasarkan data yang ada, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sungai Mentawa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Mentawa

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	85	14,89 %
2	Tidak Tamat SD	106	18,57 %
3	Tamat SD	229	40,11 %
4	Tamat SLTP	81	14,19 %
5	Tamat SLTA	60	10,51 %
6	Tamat D-1/ D-2	4	0,88 %
7	Tamat D-3/ Sarjana Muda	2	0,35 %
8	Tamat Sarjana S-1	4	0,88 %
Jumlah		571	100 %

Sumber : Profil Desa Sungai Mentawa 2013

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berpendidikan rendah, yakni hanya tamat SD sebanyak 229 orang (40,11 %), dan yang tamat SLTA sebanyak 60 orang (10,51 %). Walaupun Desa Sungai Mentawa hanya ada TK dan SD, tetapi sudah ada 10 (sepuluh) orang yang berpendidikan tinggi/ akademi, rendahnya sebagian besar pendidikan masyarakat disebabkan kurangnya sarana pendidikan yang tersedia sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Sekolah di Desa Sungai Mentawa

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah (buah)
1	TK	1 buah
2	SD	1 buah
3	SLTP	-
4	SLTA	-
JUMLAH		2 buah

Sumber: Profil Desa Sungai Mentawa 2013

Dilihat dari sarana fasilitas pendidikan yang masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga wajib belajar 12 tahun program pemerintah di Desa Sungai Mentawa tidak berjalan maksimal. Sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masih belum bias dikatakan berhasil untuk desa Sungai Mentawa. Dengan demikian pemerintah harus menambah fasilitas pendidikan yaitu sekolah menengah tingkat pertama dalam melaksanakan salah satu program yang berlangsung menyentuh masyarakat agar lebih sejahtera dengan wawasan partisipatif dalam hal implementasi kebijakan yang berwawasan birokrasi terhadap peningkatan sumberdaya manusia.

4. Keagamaan

Masyarakat Desa Sungai Mentawa mayoritas menganut agama Islam, dan sisanya beragama Kristen, Katholik dan Hindu sebagaimana terlihat pada dibawah:

Tabel 4.5 Pemeluk Agama di Desa Sungai Mentawa

No	Agama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Islam	562 Orang	98,43 %
2.	Kristen Protestan	5 Orang	0,88 %
3.	Khatolik	3 Orang	0,53 %
4.	Hindu	1 Orang	0,18 %
5.	Budha	-	-
	JUMLAH	571 Orang	100%

Sumber : Profil Desa Sungai Mentawa Tahun 2013

Sarana peribadatan yang ada di Desa Sungai Mentawa terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6 Sarana Peribadatan Desa Sungai Mentawa

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Buah)
1.	Mesjid	1 Buah
	JUMLAH	1 Buah

Sumber : Profil Desa Sungai Mentawa Tahun 2013

Kendati tidak semua sarana ibadah ada di Desa Sungai Mentawa, namun bagi masyarakat setempat tidak menjadi masalah karena warga yang beragama bukan muslim masih bisa menjalankan ibadahnya ditempat yang lain meskipun letaknya tidak begitu jauh dari Desa Sungai Mentawa.

5. Mata Pencaharian

Keadaan sosial ekonomi sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian penduduk, mata pencaharian Desa Sungai Mentawa beraneka ragam dan tampaknya terkait erat dengan posisi wilayahnya

yang berdekatan dengan perusahaan perkebunan dan Sungai Lamandau terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Mentawa

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri	8	2,60 %
2.	Pedagang	28	9,08 %
3.	Perkebunan	156	50,65 %
4.	Tani	64	20,78 %
5.	Nelayan	52	16,89 %
JUMLAH		308	100 %

Sumber : Profil Desa Sungai Mentawa Tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah mayoritas adalah perkebunan dan petani, disusul dengan mata pencaharian di sektor perikanan seperti dengan memelihara ikan dikeramba dan mencari ikan di sungai, sesuai dengan kondisi wilayah yang umumnya sungai.

6. Pemerintahan

Hasil studi dokumenter menunjukkan bahwa struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sungai Mentawa Terdiri atas (a) Kepala Desa; (b) Sekretaris Desa; (c) Kepala Urusan Pemerintahan; (d) Kepala Urusan Pembangunan dan (e) Kepala Urusan Umum;

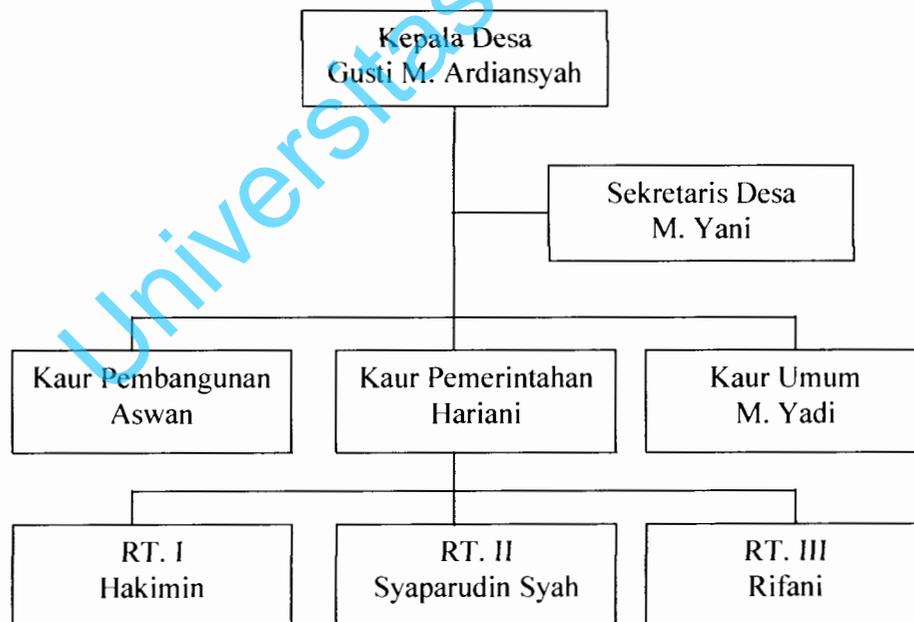
Sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan wilayah, di tingkat yang lebih rendah terdapat tata urutan perangkat yang lebih rendah berupa Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan surat keputusan Desa atau Kecamatan/ Bupati, selain masalah tentang pemerintahan ada juga Mantir Adat berdasarkan Surat Keputusan Demang Kepala Adat.

Kenyataan ini menggambarkan bahwa sistem adat istiadat masih berlaku dalam masyarakat, meskipun desa ini berdekatan dengan wilayah kecamatan.

Jumlah aparat yang ada di Desa Sungai Mentawa berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi sumber data sebagai salah satu tolok ukur bahwa di Desa Sungai Mentawa untuk Aparatur Pemerintahan Desa telah lengkap sebagai sebuah acuan dan panduan dalam melakukan penelitian. Ketika peneliti terjun ke lapangan perangkat desa yang ada dalam melakukan penelitian ini telah hadir dilokasi sehingga data desa yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan lengkap dan baik.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Desa Sungai Mentawa



Sumber Profil Desa Sungai Mentawa Tahun 2013

B. Temuan

Berikut ini ada beberapa temuan yang peneliti temukan selama mengumpulkan data lapangan:

1. Adanya bantuan yang tidak sesuai dengan bidang teknis dinas terkait, yaitu bantuan ternak ayam broiler dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi sehingga dalam pemeliharaan dan tindaklanjut bantuan tidak berjalan dengan baik.
2. Bantuan yang diberikan tidak bermanfaat secara optimal karena ketidaksiapan masyarakat penerima, contohnya bantuan alat pembuatan keripik pisang sampai sekarang belum dijalankan.
3. Bantuan ayam broiler, yang setelah diberikan sudah menghasilkan namun program tersebut tidak ada kelanjutan dari masyarakat, hasil dan modalnya dibagi habis oleh kelompok penerima.

Dan selama pengumpulan data, peneliti menambahkan jumlah informan dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling* dengan tujuan kelengkapan data dan keabsahan data.

C. Pembahasan

Peneliti akan membahas temuan-temuan tersebut diatas pada anak bab ini sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada focus penelitian. Pada anak bab ini peneliti akan membahas temuan sekaligus mengecek keabsahan data temuan penelitian.

I. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program PM2L Desa Sungai, Mentawa Kecamatan Bulik

Implementasi program PM2L di Desa Sungai Mentawa melibatkan banyak pihak baik Pemerintah Daerah, *Stakeholders* dan masyarakat desa itu sendiri sehingga menjadi satu kegiatan yang terpadu. Pengorganisasian diimplementasikan dalam bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program yang pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan hak kepemilikan dan tanggung jawab yang sama dari masing-masing individu untuk mengerjakan suatu aktifitas. Peneliti menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari Model Implementasi Kebijakan Edward III sebagai acuan pembahasan. Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Edward II, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi dan
- d. Struktur Birokrasi

a. **Komunikasi**

Menurut penjelasan Nugroho (2012: 693), Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat.

Peneliti menemukan dari data wawancara bahwa secara komunikasi antara instansi organisasi terkait program PM2L berjalan dengan baik karena selalu ada koordinasi. Berikut ini wawancara dengan Bapak Gusti M. Ardiansyah, Kepala Desa Sungai Mentawa ketika ditanyakan tentang apakah mengetahui ada program PM2L masuk ke Desa Sungai Mentawa:

Saya mengetahui adanya bantuan program PM2L masuk ke Desa yaitu dengan kami Aparatur Desa diundang rapat sosialisasi ke kantor Bappeda Kabupaten Lamandau dan disana juga ada orang dari Dinas Provinsi. Bantuan untuk desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa PM2L disampaikan pada waktu rapat itu.

Kemudian peneliti wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada

Aliansyah RT 03 warga Desa Sungai Mentawa, berpendapat:

Saya mengetahui bantuan program PM2L seperti jalan desa dan drainase serta bantuan lainnya dari warga desa juga, karena katanya ada orang Dinas dari Kabupaten sosialisasi di Balai Desa, cuman waktu itu saya tidak hadir karena saya ke Kecamatan Bulik ada urusan pekerjaan.

Setelah itu peneliti kembali mewawancarai masyarakat yang lain, yaitu bertanya kepada M. Arafik RT 02 warga Desa Sungai Mentawa, berpendapat:

Kami sangat mengetahui bantuan program PM2L dari Pemerintah Kabupaten yang mensosialisasikan kepada warga desa, salah satu bantuan dari kabupaten yaitu dari Disperindakop Kabupaten Lamandau yaitu membantu masyarakat dengan pembentukan dan legalitas Koperasi "Pajar Alam Sejahtera" dengan seluruh warga sebagai anggota dan saya diangkat sebagai ketua koperasinya.



Gambar 4.1 Wawancara dengan Masyarakat Desa Sungai Mentawa

Kemudian data wawancara dengan Bapak Lidah Hoder, S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran menyangkut sosialisasi dan koordinasi instansi terkait, hal tersebut dijawab Bapak Kadis:

Ya ada sosialisasi, dan masyarakat desa mengetahui bantuan tersebut dari program PM2L, sebelum dilaksanakan kegiatan begitu diprogramkan, rencana aksi PM2L mereka sudah diberitahukan dan program ini tidak asing lagi. Dan untuk koordinasi antara dinas selalu dirapatkan yang di koordinir oleh Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh Bapak Bupati jadi selalu dievaluasi dan selalu dirapatkan. Jadi ada time scedul yang diberi oleh pemerintah daerah. Selalu rapat, evaluasi dinas badan sampai dimana kegiatan dan terakhir rapat evaluasi.



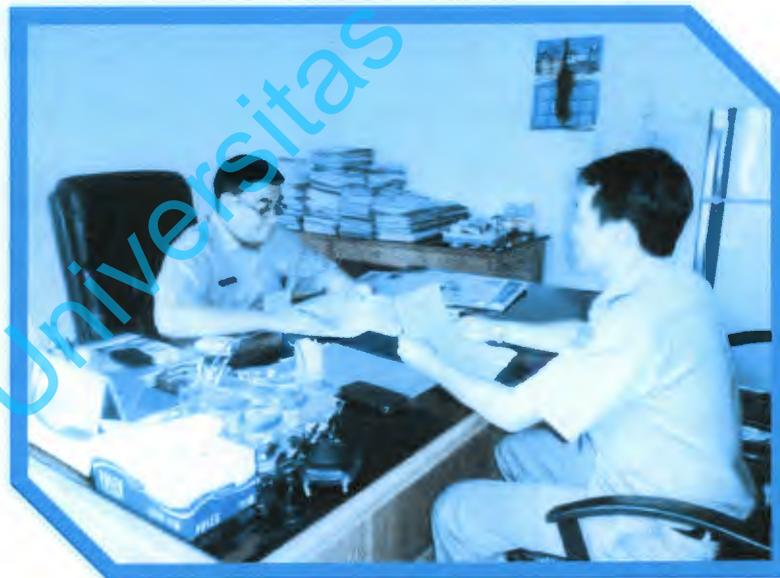
Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Lidah Hoder, S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

Kemudian peneliti menguji keabsahan data tersebut dengan cara mewawancarai Bapak Drs. Muriadi, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ketika ditanyakan tentang sosialisasi dan koordinasi antara unit kerja terkait:

Ya ada 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi, yang pertama Sosialisasi PM2L Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Lamandau dengan

mengundang seluruh SKPD terkait di Kabupaten dan Desa dan Kecamatan program sasaran. Kedua yaitu Sosialisasi PM2L Kabupaten Lamandau ke Desa sasaran program PM2L. Sedangkan untuk koordinasi dengan satuan unit kerja terkait dibentuk TIM Koordinasi, Rapat Tim penyusun Rencana aksi PM2L Kabupaten pada setiap SKPD, Rapat Tim Penetapan Rencana Aksi, Rapat Tim dalam rangka persiapan Sosialisasi ke Desa PM2L dan Monitoring pelaksanaan kegiatan PM2L di akhir tahun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari faktor komunikasi antara unit-unit kerja instansi terkait berjalan dengan baik begitu juga komunikasi dengan desa penerima program sudah ada. Ini terlihat dengan adanya pembentukan TIM Koordinasi Kabupaten, rapat tim penyusun rencana aksi PM2L, rapat tim penetapan rencana aksi PM2L, rapat persiapan sosialisasi ke desa PM2L (Tim Sosialisasi ditetapkan oleh SK Gubernur dan SK Bupati) dan monitoring pelaksana kegiatan di akhir tahun.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Drs. Muriadi, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program PM2L di Desa Sungai Mentawa didukung oleh seluruh SKPD sebab program ini merupakan usaha pembangunan dalam banyak aspek sehingga program oleh masing-masing instansi yang meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Sektor Swasta, Kepala Desa dan perangkatnya serta seluruh masyarakat. Pemerintah memang merencanakan program PM2L ini agar dapat melibatkan seluruh aparatur pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk dapat melihat kondisi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini wawancara dengan Bapak Gusti M. Ardiansyah Kepala Desa Sungai Mentawa ketika ditanyakan tentang apakah bantuan program PM2L sesuai dengan harapan masyarakat Desa Sungai Mentawa:

Kami berterima kasih dengan Pemerintah atas bantuan yang telah diberikan sesuai dengan harapan kami. Namun hal yang sangat warga butuhkan adalah perbaikan jalan besar masuk Desa menuju Kecamatan Bulik karena jalan menuju desa bapak dapat lihat sendiri masih tanah kuning, kalau cuaca hujan pasti becek dan licin serta ada beberapa titik yang rusak parah sekarang. Karena dengan adanya jalan yang bagus mobilitas kendaraan lancar, dalam pemasaran hasil kebun, tani dan ternak kami pun mudah pak.

Kemudian peneliti wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Aliansyah RT 03, warga Desa Sungai Mentawa, berpendapat:

Saya dari program PM2L ini kebetulan tidak terlibat langsung tetapi yang saya harapkan selain perbaikan jalan poros Desa menuju Kecamatan Bulik, Pemberdayaan masyarakat dengan pengaktifan kembali sawah desa yang sudah ada seluas 20 Ha karena jalan menuju sawah cuman jalan setapak, mungkin sekarang sudah tertutup semak belukar karena masyarakat tidak pernah lagi kesana. Harapan kami yang lain pak, pasar desa kalau bisa dibuka di Desa sungai Mentawa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Aliansyah, RT 02 Warga Masyarakat Desa Sungai Mentawa

Kemudian peneliti menguji keabsahan data tersebut dengan cara mewawancarai Bapak E.A. Johnny Joa, A.Pi, M.Si, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum terkait wawancara diatas:

Dinas PU Kabupaten dalam pelaksanaan rencana aksi program PM2L di Desa Sungai Mentawa yaitu membangun infrastruktur fisik pedesaan berupa drainase jalan desa. Sedangkan Dinas PU Provinsi membangun jalan setapak cor beton desa. Kami mengakui bantuan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana, seperti untuk pembangunan jalan poros masuk Desa menuju Kecamatan Bulik. Pembangunan jalan ini memerlukan perencanaan yang matang dan dana yang besar dalam pelaksanaannya. Karena didalam pelaksanaan kegiatan suatu instansi harus berdasarkan Renca Strategis SKPD dan Renja SKPD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya, implementasi program PM2L ini terhambat oleh kurangnya sumber daya terutama pendanaan atau dari sisi finansial. Terbatasnya anggaran yang

tersedia membuat setiap langkah dalam melaksanakan pembangunan desa menjadi terbatas. Sebab anggaran secara khusus untuk program PM2L tidak tersedia sehingga program dilaksanakan sumber dananya dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DAU dan APBN.

c. Disposisi

Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah faktor disposisi/*attitude*. Menurut penjelasan Winarno (2011: 200), sikap para penerima kebijakan mempengaruhi implementasi program PM2L. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sungai Mentawa dalam program PM2L ini mempengaruhi tujuan akhir program yang ini dicapai. Berikut ini wawancara dengan Bapak M. Yani Sekretaris Desa Sungai Mentawa ketika ditanyakan tentang keterlibatannya dalam program PM2L masuk ke Desa:

Kami sebagai aparat desa hanya menerima bantuan ketika bantuan itu sudah selesai atau sudah ada di desa. Sedangkan dalam pelaksanaan dan pengerjaannya proyek PM2L seperti jalan desa, drainase, rahab rumah dan pembangunan rumah dinas sudah ada pemborongnya. Kami tidak dilibatkan secara langsung dalam hal ini. Dan Desa kami menerima mesin pembuat keripik pisang tetapi kami belum bisa menjalankannya karena mesin penggerak alat keripik pisang tidak ada, dan tidak ada bimbingan dari instansi terkait cara pembuatan keripik pisang.

Peneliti kemudian mewawancarai masyarakat penerima bantuan dengan pertanyaan apakah keterlibatan masyarakat Desa Sungai Mentawa dalam program PM2L kepada Ramli RT 03, Ketua kelompok peternak ayam ras warga Desa Sungai Mentawa, berpendapat:

Kelompok kami menerima bantuan anak bibit ayam potong sebanyak 300 ekor lengkap dengan kandang dan makanannya, dan ayamnya sudah kami panen dan dijual ke desa sungai mentawa saja. Untuk

kelanjutan pengembangan usaha kelompok ada kesulitan untuk mencari bibit anak ayam potong baru, sampai sekarang kandang ayam bantuan dari Provinsi masih kosong, belum kita isi pak karena modalnya sudah habis kita bagi-bagi dengan anggota. Sebab permasalahannya karena didalam kelompok ada yang aktif dan ada yang tidak aktif pak, tetapi kalau mau bagi hasil mintan hasil yang sama. Jadi kami sepakat ayamnya kita jual habis dan hasilnya dibagikan rata anggota untuk usaha masing-masing.

Kemudian data wawancara dengan Bapak Habisman, S.E., Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM penghambat program PM2L, hal tersebut dijawab Bapak Sekretaris :

Adapun faktor penghambat dalam program PM2L ini adalah selain memang sumber dana pemerintah yang terbatas, juga yang sangat berpengaruh adalah Sumber Daya Manusia di Desa masih sangat rendah. Contohnya bantuan dari Disperindakop dan UMKM yaitu Waserda (warung serba ada) yang diberikan ke PKK belum bergerak, Bantuan mebel sederhana dan Alat pembuatan keripik pisang yang sampai sekarang belum dijalankan. Kami juga menyadari dalam bantuan alat penggerak untuk mesin keripik pisang tidak ada karena keterbatasan dana dari instansi kami, hal ini sudah kita sampaikan ke aparat desa agar dengan swadaya masyarakat dan partisipasi mereka untuk mendapatkan mesin penggerak pembuatan keripik pisang sehingga barang ini menghasilkan suatu produk, dan produk itu dapat dijual sehingga menambah pendapatan ibu rumah tangga terutama ibu-ibu PKK.

Kemudian peneliti menguji keabsahan data tersebut dengan cara mewawancarai Bapak Ir. H. Sunarto, M.A.P, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan ketika ditanyakan tentang keterlibatan masyarakat dan hambatan dalam program PM2L:

Secara langsung masyarakat dilibatkan dalam program PM2L, misalnya untuk ibu-ibu PKK ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten yaitu bantuan bibit sayur-sayuran pekarangan yang ada didapur sehari-hari seperti tomat, jagung, sawi, bayam, kangkung, terong, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, lombok, dll. Dari cara penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan. Untuk peternakannya Dinas bantu 10 (sepuluh) ekor sapi, 2 (dua) ekor sapi jantan dan 8 (delapan) ekor sapi betina yang diserahkan untuk 8 (delapan) orang

anggota kelompok penerima. Hambatan dalam peternakan sapi ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang cara beternak sapi yang baik dan benar ini masih kurang terutama cara pemberian pakan sapi, bukannya sapi dilepas dipinggir jalan desa begitu saja untuk mencari makannya sendiri, dan salah satu syarat yang masih belum terpenuhi oleh Desa Sungai Mentawa yaitu belum adanya lokasi kebun ternak atau kandang sapi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi implementasi program PM2L di Desa Sungai Mentawa, terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan ketidak siapan masyarakat penerima bantuan program. Karena dengan adanya partisipasi membutuhkan pemberdayaan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) untuk mengatasi masalah-masalah psikologis seperti halnya ketidak berdayaan, tidak percaya diri, dan merasa mereka bukan dari agen perubahan. Menurut Sumaryadi (2005: 111) mengemukakan pemberdayaan masyarakat merupakan, upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

d. Struktur Birokrasi

Terakhir, faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III adalah Struktur Birokrasi. Pengorganisasian diimplementasikan dalam bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program yang pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan hak kepemilikan dan tanggung jawab yang sama dari masing-masing individu untuk mengerjakan sesuatu aktifitas. Tim Koordinasi ini terdiri dari Tim Koordinasi Provinsi penanggungjawab Gubernur, Tim Koordinasi Kabupaten

penanggungjawab Bupati, Tim Koordinasi Kecamatan penanggungjawab Camat dan untuk Desa/Kelurahan Tim Pelaksana Program penanggungjawab Kepala Desa/Lurah. Berikut ini wawancara dengan Bapak Gusti M. Ardiansyah, Kepala Desa Sungai Mentawa ketika ditanyakan tentang apakah Kades ada mensosialisasikan program PM2L dengan masyarakat Desa Sungai Mentawa:

Kami dengan Aparatur Desa telah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan melalui rapat-rapat desa maupun secara lisan. Karena setiap bantuan yang akan datang kita musyawarahkan dengan warga, siapa saja nama warga yang menerima bantuan tersebut. Supaya yang bersangkutan menerima dan bertanggung jawab atas bantuan yang telah diberikan.

Kemudian data wawancara dengan Bapak Sekretaris Camat Bulik yaitu M. Syaifudin Zuhri, S.E, M.A.P, menyangkut sosialisasi dan koordinasi pihak kecamatan ke Desa penerima program PM2L, hal tersebut dijawab Bapak Sekretaris:

Kami dari pihak Kecamatan selalu berkoordinasi baik dengan pihak Kabupaten dan pihak Desa Sungai Mentawa. Kecamatan juga diundang oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai salah satu Kecamatan penerima program PM2L tahun 2013. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) sebagai koordinator aksi pelaksanaan program. Sosialisasi Provinsi pernah ada dilaksanakan dan ada upaya Pemerintah Provinsi untuk membentuk Sarjana PM2L dan diundang ke palangkaraya termasuk Kades, Sekdes dan pihak Kecamatan Bulik.

Kemudian peneliti wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Dra. Hj. Endang Rustiningsih, M.A.P, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau, berpendapat:

Fasilitas dan pembinaan lokasi PM2L memang mutlak harus dilakukan oleh BPMD, karena sesuai Tupoksi dan SK Bupati Lamandau Nomor : 414.2/92/II/BPMDPKB/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 Tentang Tim Koordinasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten Lamandau Tahun 2013, dimana kepala

BPMD Kabupaten Lamandau adalah selaku ketua pelaksana Tim koordinasi PM2L Kabupaten Lamandau Tahun 2013, kami ingin pelaksanaan PM2L tahun 2013 mengalami hasil dan manfaat dan berdaya guna bagi kepentingan umum.

Pernyataan dari Kepala BPMD sebagai Ketua Tim Koordinasi PM2L Kabupaten Lamandau betul-betul ingin membuktikan bahwa tupoksi dalam PM2L di Kabupaten Lamandau dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan satu tujuan mendukung program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mengentaskan desa dari kemiskinan.



Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Endang Rustiningsih, M.A.P, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari faktor struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Ini terlihat dengan adanya pembentukan TIM Koordinasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Program PM2L ini akan dapat berjalan dengan baik apabila aparat desa memiliki kemampuan untuk menerima dan menerapkan setiap program

yang dilaksanakan pemerintah, karena peran aparat desa adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dalam mengatur masyarakat desanya

Pada akhir pembahasan proses implementasi kebijakan program PM2L di desa Sungai Mentawa dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ingin diketahui yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi (Agustino, 2008: 149), bahwa Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik ini sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada kekurangannya.

2. Dampak yang dirasakan Masyarakat Kelompok sasaran pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, pengembangan masyarakat dan infrastruktur

Secara umum tujuan Program PM2L adalah untuk mewujudkan desa percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memicu pertumbuhan desa sekitarnya. Penulis akan membahas dampak yang dirasakan masyarakat kelompok sasaran terhadap implementasi PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau diantaranya mencakup aspek:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pendapatan Masyarakat;
- d. Pengembangan Kemampuan Masyarakat;
- e. Pembangunan Infrastruktur;

a. Pendidikan

Hasil studi dokumenter menunjukkan bahwa pelaksanaan program PM2L melalui pendidikan di Desa Sungai Mentawa tahun 2013, didanai oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten melewati program aksi PM2L Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Lamandau yaitu pembangunan sarana rumah dinas guru sekolah dasar (SD) dan Pemerintah Provinsi melewati Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi pengadaan mesin tik, perlengkapan meja kursi baca, rak buku dan buku-buku perpustakaan serta bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan desa PM2L serta bantuan biaya operasional sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan Provinsi.



Gambar 4.6 Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Desa Sungai Mentawa oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

Secara rinci jenis kegiatan dan sumber biaya pendidikan di Desa Sungai Mentawa tahun 2013 bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.8 Kegiatan PM2L Bidang Pendidikan di Desa Sungai Mentawa

No	Uraian Kegiatan	Output	Biaya (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	Terpenuhinya Rumah Dinas Guru	100.000.000,-	APBD	Dikjar Kabupaten Lamandau
2.	Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	20 Siswa	26.680.000,-	APBD	Dinas Pendidikan Provinsi
3.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan 1 Mesin Tik	1.405.000,-	APBD	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalteng
4.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan 1 Meja Baca	950.000,-	APBD	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalteng
5.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan 1 Kursi Baca	495.000,-	APBD	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalteng
6.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Buku Perpustakaan 1.000 eks	23.500.000,-	APBN	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalteng
7.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan 2 Rak Buku	3.300.000,-	APBN	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalteng
8.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Bimtek tenaga perpustakaan 1 orang	3.353.000,-	APBN	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Kalteng

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamandau tahun 2013

Walaupun PM2L terkesan disisipkan dalam program pendidikan yang telah ada, namun kehadiran PM2L sebenarnya mendorong dinas pendidikan setempat untuk bisa fokus perhatiannya dimana program rancangan awal Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan, oleh sebab itu warga Desa Sungai Mentawa merasakan manfaat yang begitu penting terhadap program ini dan berperan ganda terhadap kehadirannya PM2L untuk aspek pendidikan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan Yuli Yani, S.Pd Guru kelas IV yang menempati rumah dinas SD program PM2L di Sungai Mentawa sebagai berikut:

Saya sekeluarga sangat terbantu dengan adanya rumah dinas guru program PM2L ini, dulu kami sekeluarga sewa rumah di RT 02 kepunyaan pak M. Yani yang jaraknya lumayan jauh dari sekolahan. Sekarang dengan adanya rumah dinas ini, saya mengajar ke sekolah jaraknya dekat dan mudah dalam mengawasi anak-anak didik. Serta kami sekeluarga tidak sewa rumah lagi, jadi uang sewa dapat dipergunakan untuk keperluan lain serta ditabung. Secara tidak langsung kesejahteraan guru disini meningkat.

Berkenaan dengan bantuan BOS, diungkapkan oleh M. Rusmanto warga desa RT 01 Desa Sungai Mentawa sebagai berikut:

Kami sebagai orang tua murid dengan adanya dana BOS, sangat terbantu karena biaya anak-anak kami sekolah sebagian ditanggung oleh dana BOS sehingga mengurangi pengeluaran kami untuk anak sekolah.

Demikian juga dengan penunjang biaya penyelenggaraan sekolah, diakui Asikin warga RT 02 Desa Sungai Mentawa yang mengatakan sebagai berikut:

Dana BOS sangat membantu kami orang tua murid, biaya yang seharusnya untuk sekolah anak dapat disisihkan untuk ditabung.

Sehubungan dengan bantuan buku perpustakaan lengkap dengan meja baca, kursi, mesin tik dan lemari buku, diungkapkan oleh M. Yani Sekretaris:

Dengan adanya bantuan buku-buku perpustakaan lengkap dengan meja, kursi dan lemarnya. Memacu warga desa senang membaca karena selain menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah menjadi lebih giat dalam belajar.

Sementara tenaga perpustakaan yaitu Siti Mardeliawati mengungkapkan:

Saya merasa senang, karena selain menambah ilmu saya dibidang perpustakaan, saya juga dapat pengalaman cara mengatur dan mengolah perpustakaan itu menjadi baik dan menarik. Dengan pengaturan buku-buku perpustakaan yang menarik sehingga minat baca dan keingintahuan masyarakat desa mentawa semakin meningkat.

Lidan Hoder, S.Pd Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, mengatakan:

Secara umum kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi terkait dalam mensukseskan PM2L dapat dikatakan cukup baik, walaupun kami rasakan belum mencapai hasil yang maksimal, karena semuanya memerlukan proses waktu dan biaya serta dukungan masyarakat itu sendiri.

Jadi, walaupun masyarakat sudah merasakan manfaat dari kehadiran PM2L, namun manfaat tersebut masih belum optimal dalam pandangan aparat yang menangani pendidikan di Kabupaten Lamandau. Pihak pemerintah Kabupaten Lamandau tampaknya akan terus meningkatkan pelayanan publik dibidang pendidikan guna mempercepat upaya mencerdaskan masyarakat Kabupaten Lamandau yang lebih maju.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan terutama pada masyarakat di desa sungai mentawa

dimana akses mereka terhadap pendidikan sangat terbatas. Di samping itu, kesadaran akan pentingnya dalam mengenyam pendidikan masih sangat rendah dalam masyarakat. Masyarakat yang miskin harus mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar dan bekerja keras agar menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga menambah masyarakat berpengetahuan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.

PM2L merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Kegiatan yang telah dilaksanakan cukup dirasakan masyarakat ini terbukti dengan hasil wawancara dengan kelompok sasaran. Hasil yang dirasakan oleh masyarakat dalam PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik yaitu:

- 1) Biaya sekolah terbantu dengan adanya BOS.
- 2) Meningkat pengetahuan tentang pendidikan.
- 3) Tersedianya infrastuktur pendidikan yang memadai.
- 4) Tersedianya buku-buku perpustakaan.
- 5) Meningkatnya SDM dibidang perpustakaan.

b. Kesehatan

Sesuai dengan data yang ada, kegiatan pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan di Desa Sungai Mentawa dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah, tabel tersebut menjelaskan bagaimana kegiatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Sungai Mentawa selama tahun 2013 terdiri dari pelayanan Daerah Terpencil (Dacil) dan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan seragam

untuk kader posyandu, pengadaan UKS KIT, pemberian insentif untuk tenaga kesehatan daerah terpencil, serta sosialisasi Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga miskin. Sementara untuk pembangunan fisik prasarana kesehatan adalah pembangunan drainase kelancaran pembuangan air limbah rumah tangga yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau.

Tabel 4.9 Kegiatan PM2L Bidang Kesehatan Di Desa Sungai Mentawa

No.	Uraian Kegiatan	Output	Biaya (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Pelayanan Dacil dan Penyuluhan PHBS	1 Paket	Rp. 10.000.000,-	APBD Kab.	Dinkes Kabupaten
2.	Pengadaan Bahan Seragam untuk Kader Posyandu	1 Paket	Rp. 1.189.048,-	APBD Prov.	Dinkes Provinsi Kalimantan
3.	Pengadaan UKS KIT	1 Paket	Rp. 1.190.476,-	APBD Prov.	Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Terpencil	1 Paket	Rp. 6.000.000,-	APBD Prov.	Dinkes Provinsi Kalimantan
5.	TKBK Kecamatan-Desa	1 Paket	Rp. 80.000,-	APBN	BKKBN
6.	TKBK Kabupaten-Kecamatan	1 Paket	Rp. 1.500.000,-	APBN	BKKBN
7.	TKBK Provinsi-Kabupaten	1 Paket	Rp. 3.450.000,-	APBN	BKKBN
8.	Pemberian Alokasi Gratis	1 Paket	Rp. 3.500.000,-	APBN	BKKBN
9.	Pembangunan Drainase	Panjang 397 M	Rp. 200.000.000,-	APBD	PU

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Lamandau Tahun 2013

Berbagai kegiatan dibidang kesehatan yang terpacu karena program PM2L dirasakan masyarakat Desa Sungai Mentawa manfaatnya. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sungai Mentawa seperti menurut Gusti M. Ardiansyah (Kepala Desa Sungai Mentawa) mengatakan:

Dengan adanya bantuan program-program kesehatan kami masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, untuk Desa Sungai Mentawa fasilitas poskesdes dan postu sudah ada sebelum program PM2L masuk desa. Dan tenaga kesehatan berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) perawat dan 1 (satu) bidan dalam melayani kesehatan masyarakat. Kedua tenaga medis ini setiap hari pulang pergi dalam melaksanakan tugasnya, karena domisili keduanya tidak di Desa Sungai Mentawa melainkan di Kecamatan Bulik.

Sementara dengan adanya pengadaan seragam dan pembinaan Posyandu menurut Rosidah (petugas Posyandu) mengatakan:

Kami senang sekali dengan adanya bantuan pakaian dari program PM2L untuk tenaga posyandu kelihatannya rapi dan enak dipandang mata. Selain itu pembinaan posyandu dari provinsi dan kabupaten, kami dapat mengetahui dengan cepat kekurangan-kekurangan kami sebagai petugas dalam memberikan pelayanan-pelayanan dan kami juga mendapatkan informasi terbaru.

Dengan pelayanan dan penyuluhan PHBS, Ilham RT 02 Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik menyatakan:

Dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan kegiatan apa saja, apa lagi hidup sehat ini diajarkan sejak anak-anak karena dengan badan yang sehat, otak anak akan menjadi cerdas.

Sementara Masjil, tokoh masyarakat RT 01 warga Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik merasakan manfaat dari sosialisasi KB bagi keluarga miskin menyatakan:

Sosialisasi KB bagi keluarga miskin di Desa Mentawa sangat membantu untuk warga kami untuk memahami memahami, bahwa ternyata menggunakan KB itu tidak sulit dan tidak perlu biaya besar karena sudah ada program pemerintah yang membebaskan pembayaran biaya bagi masyarakat miskin dan keluarga miskin.

Dalam hal ini pembangunan drainase, Syaparudin Syah Ketua RT 03 Desa Sungai Mentawa mengatakan:

Dengan adanya drainase halaman rumah warga apabila hujan tidak tergenang air dan becek seperti sebelum ada drainase. Untuk warga

yang ada sumurnyapun tidak menjadi keruh karena karena drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan aman, nyaman, bersih dan sehat. Program drainase dari PM2L sangat membantu warga Desa Sungai Mentawa ini.

Hal senada di ungkapkan oleh M. Arafik warga RT 01 Desa Sungai

Mentawa:

Selama ini kami hanya menggunakan air sungai untuk semua keperluan sehari-hari oleh karena itu tidak ada pilihan lain, tapi sekarang untuk keperluan memasak kami sudah menggunakan air sumur bantuan pemerintah. Dan dengan dengan penyuluhan PHBS, kami jauh lebih mengerti bagaimana cara hidup yang bersih sehingga kita menjadi sehat.

Peran Dinas Kesehatan dalam program PM2L di Desa Sungai

Mentawa seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan dr. Yosef:

Dinas Kesehatan melayani masyarakat dengan penyuluhan kesehatan seperti penyuluhan PHBS yang artinya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, antara lain menjaga kebersihan badan dengan mandi 3 kali sehari, ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 kali, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, gizi seimbang terutama untuk anak-anak, MCK, mengkonsumsi air yang bersih dan direbus, pelayanan berobat gratis. Karena masyarakat Desa Sungai Mentawa bermukim atau bertempat tinggal di DAS Lamandau, sehingga MCK sampai dengan mengkonsumsi air sungai Lamandau sudah kebiasaan mereka dari dahulu. Pola perilaku hidup tidak sehat inilah yang harus kita rubah dengan program Dacil dan penyuluhan PHBS. Syukurnya masyarakat menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi air bersih, masyarakat menjadi lebih sehat, lebih makmur dan tujuan PM2L untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dapat tercapai.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di pinggiran DAS mau tidak mau menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu disebabkan tidak ada pilihan lain karena tidak tersedianya sarana air bersih. Dengan adanya bantuan pembuatan sumur dan

penyuluhan perilaku hidup sehat, secara perlahan-lahan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi air sungai mulai berubah.

Hasil yang dirasakan oleh masyarakat dalam PM2L dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan gratis.
- 2) Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan.
- 3) Tersedianya seragam untuk kader posyandu.
- 4) Tersedianya Infrastruktur pengairan limbah rumah tangga.
- 5) Pelayanan alat KB gratis.



Gambar 4.7 Pembangunan drainase untuk kelancaran air rumah tangga oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau

c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Jenis kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik guna meningkatkan pendapatan masyarakat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Kegiatan PM2L di desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Tahun 2013 Aspek Peningkatan Pendapatan Masyarakat

No.	Uraian Kegiatan	Output	Biaya (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Bantuan Sarana Usaha/ Waserda	Terlaksananya bantuan sarana bagi koperasi dan UMKM	10.000.000	APBD	Dinkes Kabupaten Lamandau
2.	Bantuan Peralatan Produksi dan Pembentukan Kelompok Pengrajin	Terbentuknya kelompok pengrajin dan bantuan mesin produksi	25.000.000	APBD	Distanakan Kabupaten Lamandau
3.	Peningkatan bantuan bibit ternak sapi	Tersedianya bibit ternak sapi 10 ekor	74.920.000	APBD	Distanakan Kabupaten Lamandau
4.	Pembangunan Bibit Karet	Terlaksananya bibit karet okulasi	8.333.000	APBD	Dishutbn Kabupaten Lamandau
5.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu perkebunan	Sapras PLTB	34.277.000	APBD	Distanakan Kabupaten Lamandau
6.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Ternak Babi	85.000.000	APBD	Distanakan Kabupaten Lamandau
7.	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung keluarga miskin	Terwujudnya kelompok usaha bersama keluarga miskin 20KK/2 Kepala	40.000.000	APBD Prov.	Dinas Sosisal Provinsi
8.	Penyebaran bibit rambutan, durian dan manggis	Bibit rambutan, durian dan manggis sebanyak 200 btg	25.000.000	APBD Prov.	Distanakan Provinsi
9.	Pembangunan Kebun Desa 2 Ha	Terbangunnya Kebun Karet Desa	23.400.000	APBD Prov.	Disbun Provinsi
10.	Rehabilitas hutan dan lahan	Pengembangan usaha hutan kemasyarakatan (40 orang)	35.000.000	APBD Prov.	Dishut Provinsi
11.	Pemanduan dan Terapan Budidaya ayam broiler	Terlatihnya 20 orang masyarakat peternak ayam broiler	100.000.000	APBD Prov	Dinas Nakertran Provinsi

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Lamandau Tahun 2013

Tabel tersebut menjelaskan bahwa bantuan program PM2L untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti: Bantuan waserda (warung serba ada), Alat produksi keripik pisang dan alat mebel sederhana, peningkatan produksi dan mutu pertanian, Bantuan bibit mangga, durian dan manggis, usaha hutan kemasyarakatan, Peningkatan bantuan bibit ternak sapi, ternak babi, bantuan bibit karet okulasi, pembentukan kelompok pengrajin, dan tenaga terlatih peternak ayam boiler.

Selain itu dalam bentuk bantuan modal usaha seperti bantuan dan bergulir, bantuan peralatan bagi usaha UMKM dll, sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih pada kooperatif menyikapi pembangunan yang lebih relevan dan efisiensi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat merasa manfaat dari pelaksanaan PM2L dalam upaya peningkatan pendapatan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Mariani, Ketua PKK Desa Sungai Mentawa yang menyatakan:

Saya sangat setuju dengan program waserda atau warung serba ada, bantuan alat pembuat keripik pisang dan bantuan bibit sayur-sayuran di kebun PKK. Adanya kebun PKK menambah keterampilan dan pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang cara menanam sayur dipekarangan. Tanaman sayurannya seperti kacang panjang, cabe, ubi jalar, ubi kayu, tomat, bayam, kangkung, jahe, jagung, timun, terong, lobak, pare, dll. bahwa kegiatan ini salah satu program yang diharapkan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan melewati ibu-ibu rumah tangga.

Sementara bagi Hakimin, Ketua Kelompok penerima ayam boiler mengungkapkan bahwa:

Manfaat yang dirasakan kelompok kami penerima ayam boiler dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yaitu kami bisa mengetahui cara beternak ayam boiler dengan baik. Cuma bantuan

ini tidak bergulir karena setelah ayam kami jual, hasilnya kelompok bagi-bagi sebagai modal usaha.

Susilawati warga Desa Sungai Mentawa RT 03 bahwa Peningkatan produksi dan mutu pertanian menyatakan:

Dengan adanya pelatihan pertanian di tambah lagi dengan Tersedianya herbisida, menambah pola pikir saya dalam mengupayakan pelaksanaan tanaman pekarangan yang lebih produktif, dan untuk biaya dapur rumah tangga bisa tertutupi karena sayur-sayuran seperti lombok, jahe, terung, bayam, timun, dll tidak membeli. Biaya untuk kebutuhan dapur dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya.

Sedangkan bantuan bergulir muncul di Desa Sungai Mentawa menurut Asmudi, Ketua Kelompok Ternak Sapi memberikan sebuah gambaran bahwa:

Bantuan bibit ternak sapi sebagai modal awal untuk mengolah sapi yang lebih baik dalam mengembang biakkan secara turun temurun melalui bibit anak sapi yang baru lahir agar lebih berkembang biak, dengan tata cara pemeliharaan secara berkesinambungan, saya akan betul-betul merasakan manfaat dari bantuan bibit ternak dimaksud sehingga lebih berdaya guna untuk usaha saya agar lebih berkembang.

Untuk bantuan bibit karet di Desa Sungai Mentawa yang akan dibagikan kepada masyarakat menurut Rudi Hartono Warga RT 03 mengatakan:

Bantuan bibit Karet merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, saya merasa terbantu untuk menunjang perekonomian yang lebih baik bagi keluarga saya dimana bibit karet itu adalah modal usaha yang harus lebih berkembang untuk meningkatkan pendapat sehari-hari bagi kebutuhan keluarga untuk menambah penghasilan/sebagai mata pencaharian.

Sedangkan Pembentukan Kelompok pengrajin Desa Sungai Mentawa M. Pajri RT 03 mengungkapkan sebagai berikut:

Sebelum kami mengetahui bagaimana proses pembentukan kelompok pengrajin terlebih dahulu kami dapat memahami dan mempelajari bagaimana, kelompok ini dapat dilaksanakan dalam mengolah hasil kerajinan yang akan ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari dan meraih keuntungan yang memadai.

Dalam kegiatan bantuan pemeliharaan tanaman karet masyarakat,

M. Arafik warga RT 01 Desa Sungai Mentawa, mengatakan:

Dulu apabila kami menanam karet, setelah itu kami biarkan tumbuh sampai pada saatnya nanti kami menyadap getahnya, sekarang kami menyadari bahwa tanaman karet juga harus di pelihara dengan baik supaya bisa memberikan hasil yang baik lagi.



Gambar 4.8 Bantuan bibit karet unggul dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau

Dari berbagai pendapat diatas dapat kita rilis bahwa semua program yang dilakukan pemerintah tersebut benar demi kemajuan dan pembangunan Desa Sungai Mentawa agar lebih layak dan maju daripada sekarang. Hasil pengamatan di lapangan bahwa kegiatan yang diberikan dengan memanfaatkan berbagai pola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

untuk mengolah atau menindaklanjuti semua program yang ada pada pemerintah, sehingga dapat terwujud dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi karena kebutuhan masyarakat lebih diutamakan agar demi meningkatkan kesejahteraan sosial baik ekonomi dan lain sebagainya. Adapun perkembangan yang terjadi di lapangan apabila seseorang susah dalam melakukan pemahaman terhadap tujuan pemerintah tidak lama program itu tidak akan berjalan dengan baik, sebab keberhasilan PM2L harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumberdaya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat setempat.

Menanggapi pernyataan diatas Ir. H. Sunarto, M.A.P, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Lamandau menjelaskan bahwa:

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Lamandau, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau sesuai dengan Program-program yang ada dalam DPA SKPD Distrikan Kabupaten Lamandau. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti bantuan sapi 10 ekor, bantuan bibit sayur-sayuran untuk PKK, bantuan Herbisida, pupuk dan obat-obatan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikan Kabupaten Lamandau secara berkala bersama-sama dengan masyarakat pemilik kebun melakukan kegiatan langsung di lapangan, mulai dari cara menanam / mengatur jarak, membersihkan dari gulma, memberikan pupuk, kapan saat dan bagaimana cara memanen tanaman perkebunan dan pertanian, yang dibantu oleh pemerintah tidak cukup akan tetapi kelompok ini memiliki modal meskipun tidak banyak dan tidak mencukupi sesuai dengan yang mereka butuhkan, selain dana yang terbatas partisipasi masyarakat juga kita harapkan, Adapun keluhan yang mereka rasakan adalah ketidakpahaman mereka terhadap cara pengelolaan dana kelompok, dalam mengelolanya kami serahkan sepenuhnya kepada kelompok, kami hanya berharap pihak dari pemerintah Desa agar betul melakukan pemantauan dan memonitor perkembangan kelompok yang ada dalam wilayah kerjanya, melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tentang rawan pangan, memang kami melakukan pendataan saja. Data yang kami kumpulkan di lapangan sebagai bahan kami dalam menyusun program apa yang paling tepat dilakukan di tahun yang akan datang.



Gambar 4.9 Bantuan bibit ternak sapi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau

Fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PM2L dirasakan masyarakat sangat membantu mereka dapat dipahami bahwa isi kegiatan dalam PM2L sesuai dengan usaha masyarakat yang berbasis lokal. Selain itu, pendapatan yang meningkat disebabkan kegiatan dalam PM2L sangat membantu masyarakat dalam permodalan dan pengetahuan serta keterampilan. Kegiatan berupa pelatihan, sosialisasi, bantuan modal usaha dan bantuan bibit dirasakan oleh masyarakat dapat meningkatkan akses mereka terhadap pendapatan yaitu:

- 1) Tersedianya modal usaha masyarakat.
- 2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat.
- 3) Meningkatnya keterampilan masyarakat.
- 4) Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.

d. Pengembangan Kemampuan Masyarakat

Sebagai desa Sungai Mentawa penerima program bantuan permodalan dari berbagai SKPD, pengembangan kemampuan masyarakat juga dilakukan. Hal ini menjadi perhatian Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan dan disambut baik Ibu Mariani Ketua PKK Desa Sungai Mentawa yang mengatakan:

Pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak BKPP dan Disperindagkop Kabupaten Lamandau, sangat membantu kelompok penerima bantuan untuk mengolah dana bantuan mereka menjadi baik dan bagaimana melakukan tata tertib administrasi pengelolaan keuangan, bagaimana cara pengemasan hasil produksi dan pemasaran.

Hal senada diungkapkan Susilawati, warga RT 02 Desa Sungai Mentawa:

Saya sebagai ketua kelompok sekarang merasakan lebih mengerti bagaimana cara mengelola dana-dana bantuan demikian juga dalam pembagian tugas-tugas kepada anggota kelompok, kami melakukan semuanya dengan transparan sehingga tidak ada kecurigaan sesama anggota kelompok.

Kegiatan Pembentukan Koperasi yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau ditanggapi dengan baik oleh M. Arafik, Ketua Koperasi Pajar Alam Sejahtera Desa Sungai Mentawa yang mengungkapkan:

Saya atas nama seluruh anggota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah, khususnya kepada Bapak Bupati Lamandau Ir. Marukan karena beliau peduli dengan masyarakat Desa Sungai Mentawa. Kami sudah mempunyai Koperasi yang bernama Pajar Alam Sejahtera dengan jumlah anggota 156 KK. Koperasi kami bergerak dibidang perkebunan plasma kelapa sawit seluas 380 Ha yang bermitra dengan PT. Pillar sebagai avalist kami. Kebun kelapa sawit kami baru sudah dibuka sekitar 200 Ha dan yang sudah tertanam sekitar 100 Ha. Dalam 4

tahun akan datang kami sudah merasakan hasil panen sawit kami. Dengan program pemerintah ini sangat jelas kedepannya membantu masyarakat Desa Sungai Mentawa.

Lebih lanjut Habisman, S.E, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau menegaskan bahwa:

Disperindakop dan UMKM memberikan pendidikan pelatihan supaya masyarakat bisa mandiri. Seperti pembentukan koperasi. Dengan adanya Koperasi Pajar Alam Sejatera di Desa Sungai Mentawa membuat dampak positif, membuka akses lapangan kerja, membuka akses jalan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak terlepas oleh bantuan Bapak Bupati Lamandau dan teman-teman dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah berusaha semampu mungkin untuk memberdayakan masyarakatnya supaya masyarakat dapat meningkatkan ekonominya sendiri tanpa bergantung dengan bantuan pemerintah. Hal ini sesuai menurut Sumaryadi (2005: 111) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan PM2L dalam upaya pengembangan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan, penyebaran informasi, pembentukan kelompok/ koperasi, penyuluhan dan bimbingan serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Dengan sasaran tumbuhnya kelembagaan masyarakat yang tangguh, dinamis, dan berdaya saing serta mandiri. Hasil yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Sungai Mentawa dalam upaya pengembangan ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- 2) Meningkatnya peran dan kepedulian masyarakat terhadap PM2L.
- 3) Meningkatnya kemampuan mengelola permodalan dan usaha.

e. Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan hasil studi dokumenter, kegiatan pembangunan infrastruktur dan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan melalui PM2L di Desa Sungai Mentawa dapat dilihat dari Tabel 4.11, Tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pembangunan di Desa Sungai Mentawa terdiri atas pembangunan Infrastruktur Jalan Desa, Pembangunan Rumah Dinas Guru, Rehab Rumah Miskin, dll.

Tabel 4.11 Kegiatan PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Aspek Infrastruktur

No.	Uraian Kegiatan	Output	Biaya (Rp)	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1.	Pembangunan Drainase	1 Paket	200.000.000	DAU	Dinas PU Kabupaten
2.	Pembangunan Rumah Dinas Guru	1 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten	DIKJAR Kabupaten
3.	Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton	1 Paket	300.000.000	APBD Provinsi	Dinas PU Provinsi
4.	Rehab rumah Miskin (5 rumah)	1 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten	BPMDes Kabupaten

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Lamandau Tahun 2013

Sedangkan kegiatan untuk infrastruktur terdiri dari Pembangunan drainase, pembangunan rumah dinas guru, pembangunan jalan setapak cor beton dan rehab rumah miskin sebanyak 5 (lima) buah.

Kegiatan ini disambut sukacita Johar RT 02 warga Desa Sungai Mentawa yang menyatakan:

Saya sangat berterimakasih dengan adanya program PM2L, rumah kami menjadi baru dan layak huni dan atapnya tidak lagi bocor apabila hujan.

Hal senada diungkapkan oleh Maspah warga RT 02 Desa Sungai Mentawa juga berpendapat:

Saya udah tua, tidak mungkin lagi bagi saya untuk bisa memperbaiki rumah saya, tapi dengan adanya bantuan bahan untuk merehab rumah, sekarang Bapak bisa melihat rumah saya jauh lebih bagus dari sebelumnya, Terimakasih lanjutkan terus PM2L.



Gambar 4.10 Rehab rumah warga miskin dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau

Dari ungkapan diatas dapat dirasakan kebahagiaan warga masyarakat yang mendapatkan bantuan bahan bangunan, Berdasarkan pengamatan di lapangan bantuan untuk rehab rumah sudah tepat sasaran. Hal ini juga ditegaskan Dra. Hj. Endang Rustiningsih, M.A.P, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Lamandau:

Selaku ketua pelaksana Tim koordinasi PM2L, kami BPMD bertanggung jawab atas keberhasilan program PM2L di kabupaten

Lamandau. Salah satu bantuan dari BPMD ke Desa Sungai Mentawa adalah Rehab 5 buah rumah masyarakat miskin. Bantuan bahan untuk bangunan rehab rumah kami arahkan pada keluarga yang sangat miskin berdasarkan data yang ada pada SK Bupati Lamandau dan kami melakukan cross cek dilapangan terhadap data tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung PM2L agar masyarakat miskin di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik dapat merasakan manfaat daripada program ini.

Desa Sungai Mentawa sebagai Desa yang mendapatkan bantuan dari program PM2L mengalami banyak peningkatan seperti pembangunan fasilitas umum seperti cor jalan dan pembuatan drainase yang dilakukan oleh Dinas PU di Desa, Aliansyah RT 02 warga Desa Sungai Mentawa Mengatakan:

Dengan adanya pembuatan cor beton, drainase jalan umum kami merasakan manfaatnya, apabila hari hujan kami tidak merasakan lagi lumpur di kaki dan lebih nyaman apabila berjalan pada malam hari.

Hasil pengamatan lapangan menemukan bahwa pembangunan cor beton dan drainase sebagai akses umum selama ini yang di tunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh karena itu selama ini tidak semua wilayah Desa Sungai Mentawa mendapatkan akses umum, seperti halnya di wilayah kantor desa yang dulunya kotor/semerawut akhirnya dapat tertata dengan baik, sehingga cukup mendukung akses kelancaran dalam pelaksanaan proses pelayanan terhadap Masyarakat. Oleh sebab itu, para pihak yang berkepentingan dengan PM2L merasa berkewajiban untuk mengupayakan kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur guna kelancaran pelaksanaan PM2L.



Gambar 4.11 Pembangunan jalan setapak cor beton dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk menunjang kelancaran akses jalan di depan kantor Desa Sungai Mentawa dan sekitarnya dilakukan cor beton, seperti yang disampaikan oleh Gusti M. Ardiansyah Kepala Desa Sungai Mentawa:

Kantor Desa Sungai Mentawa berada diujung desa, dimana jalan yang persis berada di depan kantor desa adalah satu-satunya akses jalan yang digunakan masyarakat untuk saling berhubungan apabila tidak dilakukan cor beton jalan dan drainase akes akan dikuatirkan badan jalan akan hancur dan akses jalan bagi masyarakat akan terganggu.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jalan yang dimaksud memang satu-satunya jalan darat yang digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, terlebih di ujung jalan ini ada sebuah aliran sungai yang setiap hari akan meluap apabila hujan deras. Dapat dibayangkan apabila tidak dilakukan cor beton jalan dan drainase, hal ini akan berpengaruh terhadap roda perekonomian sebagian masyarakat di Desa Sungai Mentawa, karena aktifitas sehari-hari menuju kebun selalu

melalui Kantor Desa Sungai Mentawa, karena sebagian besar menggantungkan hidup pada perkebunan dan berladang.

Khusus untuk pembangunan Rumah Dinas Guru, Yuli Yani Guru kelas IV SD Sungai Mentawa mengungkapkan:

Syukur Alhamdulillah, saya sekeluarga sangat berterima kasih atas bantuan rumah dinas ini, dulu saya sekeluarga sewa rumah tapi setelah adanya rumah dinas kami tidak sewa rumah lagi. Jadi uang sewa rumah dapat saya tabung dan untuk keperluan lainnya. Dulu depan rumah dinas dan sekolahan jalannya kalau hujan licin dan becek sehingga sekolah menjadi kotor, setelah jalan di cor walaupun hujan lebat kesekolah tetap mudah.

Jadi berbeda dari yang diasumsikan diatas, dalam penelitian ini terungkap, bahwa kehadiran PM2L tidak saja menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan kelompok sasaran pada aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan pengembangan kemampuan masyarakat, akan tetapi juga berdampak terhadap pembangunan fisik/prasarana di Desa Sungai Mentawa, Oleh sebab itu dalam interpretasi berikutnya semua aspek yang ditemukan tersebut akan menjadi bahan interpretasi peneliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Implementasi Kebijakan terhadap pelaksanaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Komunikasi antara organisasi terkait dalam pelaksanaan program PM2L di Desa Sungai Mentawa melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa selaku implementor. Sasaran program PM2L secara umum adalah menurunkan jumlah desa tertinggal per Kabupaten/ Kota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dalam pelaksanaannya komunikasi berjalan dengan baik ini terlihat dengan adanya pembentukan Tim Koordinasi Provinsi dan pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten, rapat tim penyusun rencana aksi PM2L, rapat tim penetapan rencana aksi PM2L, rapat persiapan sosialisasi ke desa PM2L (Tim Sosialisasi ditetapkan oleh SK Gubernur dan SK Bupati) dan monitoring pelaksana kegiatan di akhir tahun.
2. Sumberdaya yang dilibatkan dalam pelaksanaan program PM2L didukung oleh seluruh SKPD baik dari Provinsi dan Kabupaten, hal ini dikarenakan program PM2L merupakan usaha pembangunan dalam banyak aspek sehingga melibatkan masing-masing instansi yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, sektor swasta, pemerintahan

desa. Sedangkan sumber pendanaan program PM2L di Desa Sungai Mentawa berasal dari dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBN, DAU. Dalam pelaksanaannya ketersediaan keuangan menjadi kendala yang menyebabkan pelaksanaan program PM2L menjadi belum maksimal hanya terbatas pada anggaran yang tersedia sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

3. Disposisi pelaksanaan kebijakan program PM2L di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik ini Program PM2L yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dilaksanakan di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau faktor disposisinya terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat dan ketidaksiapan masyarakat penerima bantuan program.
4. Struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan program PM2L telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh pemerintah, mulai dari persiapan dan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil pencapaian sampai dengan tahap pemantapan. Aparatur desa adalah ujung tombak yang berhubungan langsung dalam mengatur masyarakat desanya, apabila aparat desa memiliki kemampuan untuk menerima dan menerapkan setiap program yang dilaksanakan pemerintah maka program tersebut akan mencapai tujuannya.
5. Berdasarkan penilaian masyarakat PM2L adalah program Pemerintah Kalimantan Tengah yang berdampak positif kepada aspek Pendidikan,

Kesehatan, pendapatan, sarana prasarana, infrastruktur dan kemampuan masyarakat yang menjadi desa sasaran program tersebut.

B. Saran

Dari simpulan yang didapat dari penelitian ini maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar pemerintah membentuk Tim khusus diluar SKPD yang terlibat untuk mengevaluasi kegiatan PM2L yang sudah dilaksanakan sehingga lebih bersifat objektif dan dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan PM2L di tahun berikutnya.
2. Untuk implementasi kebijakan program PM2L selanjutnya, Bimbingan kepada aparatur desa dan masyarakat penerima bantuan harus lebih ditingkatkan. Untuk Sosialisasi PM2L tidak perlu dibatasi hanya kepada masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, tetapi penting melibatkan sektor swasta dan masyarakat umum sebagai stakeholder.
3. Mengingat PM2L mampu melahirkan kegiatan pembangunan yang bermanfaat dan mendapatkan dukungan masyarakat, saran agar program PM2L ini untuk pendudukan perlu dana yang besar

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006) *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta
- Bappeda dan Statistik, (2013). *Selayang Pandang Kabupaten Lamandau Tahun 2013*, Nanga Bulik: Versi Bappeda dan Statistik Kabupaten Lamandau.
- Badan Pusat Statistik, (2013). *Kalimantan Tengah Dalam Angka 2013*, Palangkaraya.
- Dunn, W.N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi Evaluasi*. Elex Komputindo.
- Goulet, Denis (1997). *the Cruel Choice: A New Concept in The Theory of Development*. New York : Atheneum.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Sumber: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>). Diakses tanggal 3/03/2014 pukul 14.00 WIB.
- Kismartini, dkk. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lukman, Ali. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ke-II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marline. (2012). *Studi Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah tahun 2008-2010*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Milles, Matthew B. & Huberman, Michael (2 Ed.) (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. United State of America: Sage Publication.Inc.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Pius A. Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola 2004.

- Profil Desa Tahun 20012-20113, Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- Ravieq.Z. (2010). *Evaluasi Program mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*. Universitas Lambung Mangkurat, Banjar Masin.
- Rosita, T [et al]. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*.Cet.8; Ed. 1, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press Jakarta.
- Sumaryadi, I.N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Pres, Bandung.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presinndo.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021. 7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Fery Natalianto
NIM : 018788135
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 25 Desember 1977
Registrasi Pertama : 2012.2
Riwayat Pendidikan : Sarjana Kehutanan
Riwayat Pekerjaan : 1. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Kabupaten Lamandau Tahun 2003 – 2014.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Lamandau Mei 2014
sampai dengan sekarang.
Alamat Tetap : Jl. Djagui Mamud I No.94, Nanga Bulik.
Telp/ HP : 081255443878
Email : ferynatalianto@gmail.com

Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA****Pertanyaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Instansi Tujuan**

1. Apakah sebelum program PM2L masuk ke Desa sasaran ada sosialisasi?
2. Bagaimana koordinasi dengan unit satuan kerja terkait?
3. Program PM2L kegiatan apa saja dari instansi Bapak/ Ibu yang masuk ke Desa Sungai Mentawa?
4. Apa dasar penentuan rencana aksi kegiatan ke Desa sasaran program dari instansi Bapak/ Ibu?
5. Apakah kendala yang dihadapi dalam implementasi program PM2L di Desa Sungai Mentawa?
6. Apakah dampak bagi masyarakat kelompok sasaran program PM2L dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan kemampuan masyarakat di Desa Sungai Mentawa?

Pertanyaan kepada masyarakat sasaran program PM2L di Desa Sungai Mentawa

1. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara (i) apakah mengetahui program PM2L masuk Desa Sungai Mentawa?
2. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara (i) ikut serta dilibatkan dalam pelaksanaan program PM2L?
3. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara (i) merasakan dampak program PM2L dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan kemampuan masyarakat di Desa Sungai Mentawa?
4. Apakah program bantuan PM2L di desa Bapak/ Ibu/ Saudara (i) sudah sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat desa sungai mentawa?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dan Pengkodean

SUMBER	LOKASI	ISI WAWANCARA	KET
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	Kantor Bappeda Kabupaten Lamandau	<p>1. Terima kasih, selamat siang pak.</p> <p>2. Selamat siang.</p> <p>3. Maksud kedatangan saya kesini adalah untuk wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Bappeda eee dalam rangka penelitian saya pak, yaitu Implemetasi Kebijakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Di Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Kenapa saya meminta data dengan Bappeda karena Bappeda adalah salah satu instansi terkait dalam program PM2L dan eee koordinatonya untuk di kabupaten. Langsung pak kita masuk ke pertanyaan pertama. (1) Apakah sebelum program PM2L masuk ke desa sasaran, ada sosialisasi pak?</p> <p>4. Terima kasih eee atas kesediaannya datang kesini terutama sesuai dengan surat ijin penelitian dan lain-lain sekiranya kami bisa mendukung data yang terkait dengan penelitian ini yang tadi menyangkut masalah PM2L. Sebagaimana kita ketahui kegiatan PM2L adalah program provinsi selama pak gubernur teras narang semenjak tahun 2008, sekarang ini kita sudah melaksanakan tahun 2014. Artinya standar yg kita laksanakan dalam kegiatan PM2L ini, sosialisasi selalu dilaksanakan baik dari pihak provinsi dan pihak kabupaten.</p>	

		<p>Yang dari Pihak provinsi mereka juga menganggedakan waktu pelaksanaan sosialisasi PM2L terutama yang terkait dengan 3 (tiga) lokasi PM2L berdasarkan sk gubernur tahun ketiga dan itu terkait dengan kegiatan provinsi yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut. Dari hasil sosialisasi tersebut kita tahu, karena kita dari pemerintah kabupaten juga wajib melaksanakan sosialisasi ke desa sasaran. Dari sosialisai tersebut kita tahu mana kewenangan provinsi dan mana kewenangan kabupaten sehingga tidak terjadi tabrakan. Makanya disitu tugas dari BPMDES selaku yg terlibat dalam PM2L yang mengkoordinir masalah perencanaan kegiatan sehingga bagian bagian yang direncanakan bisa sesuai, tidak tabrakan. Jadi sudah dilaksanakan sosialisasi baik dari provinsi dan kabupaten. Supaya masyarakat kita tidak terkejut dan bisa mempersiapkan diri karena bagaimanapun kita melaksanakan program tetapi tidak nyambung yang di masyarakat maka hasilnyaapun tidak bisa maksimal.</p> <p>5. Ok pak kita lanjut ke pertanyaan kedua, (2) bagaimanakah koordinasi dengan unit satuan kerja terkait pak?</p> <p>6. Ok, untuk koordinasi dengan unit satuan kerja terkait karena kita ini sifatnya SKPD yang bertugas dalam koordinasi baik program maupun kegiatan biasanya kami membentuk tim, tim ini setelah dibentuk kita undang secara bersama untuk</p>
--	--	---

		<p>rapat tim untuk menyusun rencana aksi PM2L yang akan dilaksanakan oleh SKPD ke lokasi sasaran dan rencana ini otomatis bukan hanya rencana tetapi kita akomodir ke dalam DPA dan kegiatannya pasti. Sehingga rapat tim menetapkan rencana aksi PM2L yang dilaksanakan oleh SKPD yang terkait secara langsung kepada masyarakat baik itu bersifat pemberdayaan maupun yang bersifat pembangunan fisik di dilaksanakan di desa. Rapat tim ini secara otomatis dalam rangka kita persiapan-persiapan untuk kalau memang semuanya telah direncanakan dan terdani secara otomatis tim itu dibentuk berdasarkan sk bupati kalau untuk tingkat kabupaten, dan untuk provinsi sk gubernur. Berdasarkan rapat tim rencana aksi kita laksanakan dilapangan. Terakhir kita monitoring pelaksanaan, apakah misalnya dibidang kesehatan apakah sudah melaksanakan kegiatan atau Dinas PU demikian sesuai yang terkait dengan tugas fungsi dari dinas masing-masing sesuai dengan hasil rapat dalam penyusunan rapat rencana aksi tadi biasanya kita laksanakan akhir tahun biasanya triwulan IV untuk monitoring kemajuan pelaksanaan PM2L ini. Selain memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau dirapatkan dalam rangka meningkatkan koordinasi sehingga tidak ada bagian-bagian yang tidak terlaksana dari target masing-masing sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan oleh tim. Jadi tetap ada koordinasi selama ini.</p>
--	--	---

		<p>7. Baik pak, kita masuk pertanyaan ketiga (3) Program PM2L kegiatan aksi apa saja apa saja dari dinas instansi bapak?</p> <p>8. Kita mengetahui Bappeda adalah suatu badan perencanaan daerah secara otomatis tugas kami sebenarnya terkait dengan PM2L ini adalah mengkoordinasikan program-program dari semua SKPD tadi untuk disosialisasi dan dilaksanakan jadi tugas kami hanya koordinasi. Sementara untuk pelaksanaannya adalah dinas teknis, kalau terkait dengan Bappeda adalah tugas kami hanya mengkoordinasi saja artinya bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pendanaannya dan nanti kami juga yang mengevaluasi hasil akhirnya. Sementara yang dinas teknis katakan misalnya dilapangan itu memang sesuai fungsinya, kalau bidang pendidikan, kesehatan dan PU itu lebih bergerak di program ini. Jadi kami terkait pada koordinasi dan pengendalian program sebagaimana tim yang telah disusun eee.. dalam PM2L ini dimana berbeda adalah koordinatormya untuk eee kegiatan ini.</p> <p>9. Ya pak, terus lanjut pertanyaan yang keempat (4) Apa dasar penentuan rencana aksi kegiatan ke desa program sasaran dari instansi bapak?</p> <p>10. Jadi dasarnya yang pertama karena ini program strategis dan sifatnya rutin dilaksanakan setiap tahun, maka secara rutin juga eee...untuk kegiatan ini kita masukan dalam rencana strategis kami Bappeda dan juga sebagai rencana kerja atau</p>
--	--	--

		<p>renstra dan renja yang nantinya setiap tahun kita tuangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran di setiap SKPD. Dan begitu juga kami kira untuk SKPD yang lain karena ini juga program strategis andalan dari provinsi yang harus kita dukung ya, pelaksanaannya otomatis semuanya inikan...eee..kita masukan kedalam renstra, renja maupun DPA SKPD yaitu menjadi dasar kita melaksanakannya dalam rangka untuk ee..pengentasan kemiskinan yang ada di desa dan juga membuka keterisolasian yang ada di desa yang mana selama ini kita mengetahui desa-desa PM2L ini rata-rata desa yang dalam kondisi daerah terpencil, pedalaman, tertinggal menjadi desa tidak tertinggal atau desa maju itu harapan kita semua karena bagaimanapun ini juga merupakan agenda rutin pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan ini eee menjadi perhatian kita semua, pokok yang harus kita tuntaskan ya tiap tahun salah satunya melalui program PM2L ini.</p> <p>11. Iya pak kita lanjut pertanyaan yang kelima (5) Apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi program PM2L di Desa Sungai Mentawa?</p> <p>12. Bagaimana kita ketahui Sungai Mentawa merupakan bagian PM2L dan persisnya terletak dipinggir sungai bulik eee artinya transportasi selama ini melewati sungai tetapi dengan beberapa program desa ini sudah dapat lewat darat. Namun demikian PM2L tidak</p>
--	--	--

		<p>semuanya mulus dilaksanakan didesa karena ada beberapa faktor yang harus mendukung dalam pelaksanaan PM2L ini main setnya ataupun hal-hal yang terkait kondisi fisik didesa katakanlah misalnya didesa itu dalam rangka meningkatkan perekonomian ternyata pasar desanya belum ada, jadi sehingga untuk menampung hasil dari pertanian masyarakat mengalami kendala akses ini bagaimana kedepannya bisa kita penuhi terutama untuk pasar desa. Kedua sesuai yang saya katakan tadi masyarakat berada dipinggir sungai secara otomatis dalam kontek sanitasi masyarakat masih dominan menggunakan eee sungai ini sebagai MCK lah, katakan dimana disitu ada jamban, disitu juga mengambil air bersih juga disungai, kedepannya harapan kita bagaimana mungkin untuk sarana air bersihnya kita bangun memang MCK yang sebenarnya yang istilahnya menggunakan sumur yang layak dan ini dalam rangka mengatur pola hidup masyarakat juga karena dipinggir sungai oleh sebab itu yang menjadi kendala kita karena program PM2L juga sasarannya penyiapan air bersih untuk masyarakat selama ini mereka untuk merubah main set dari jamban untuk istilahnya membuat wc yang ada tidak lah mudah. Pemenuhan air bersih dengan kondisi seperti tadi yang menjadi kendala kita dalam hal ini kan bagaimana ketersediaan air bersih kedepan kalau memang melalui PM2L ini kita membiasakan masyarakat tidak lagi mengambil air ke sungai</p>
--	--	---

		<p>untuk kepentingan yang dikonsumsi karena bagaimanapun disungai tempat membuang limbah, baik limbah rumah tangga ataupun yang lainnya sehingga secara otomatis kondisinya tidak begitu sehat lah. Jadi itu beberapa hal tadi saya ulang kembali pertama untuk pasar desa belum ada, MCK termasuk dominan ya jamban masih dominan di sungai, kemudian sarana air bersih yang belum tersedia. Kedepan kita berharap juga karena selama ini eee untuk jalur komunikasi mungkin juga menjadi kendala memang eee sungai mentawa ini hanya, apa namanya kalau sinyal hp belum ada, hanya ada terdapat beberapa titik tertentu saja mungkin itu juga menjadi faktor penghambat karena bagaimanapun kita perlu komunikasikan dengan baik eee dengan adanya komunikasi mungkin informasi juga akan mudah sehingga mobilitas masyarakat disana memperoleh informasi perlu kita tingkatkan lagi sehingga dengan demikian harapan kita masyarakat desa mengalami kemajuan secara otomatis beberapa faktor penghambat ini akan kita penuhi kedepan lewat program PM2L ini.</p> <p>13. Iya pak kita masuk ke pertanyaan keenam (6) Apakah dampak bagi masyarakat kelompok penerima sasaran program PM2L dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan kemampuan masyarakat di desa sungai mentawa, pak?</p> <p>14. Baik, untuk bidang pendidikan</p>
--	--	--

		<p>karena kita tahu bahwa ini merupakan sarana yang dasar yang harus kita laksanakan dibidang pendidikan ini selama ini yang kita laksanakan lebih meningkatkan pembangunan. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah, karena itu berdampak selama pelaksanaan kegiatan PM2L dari dulu guru-guru beralasan karena inikan mitra kita karena guru-guru beralasan tempat tugasnya belum terakomodir dengan baik jadi ada sebagian guru yang berada di desa tengganya atau mungkin mengajar disana nah itu dari hasil pemantauan kami eee dampak yang kita harapkan sebenarnya dampaknya positif terutama perubahan main set masyarakat dengan pelaksanaan program ini maka harapan kita terutama di bidang pendidikan tadi, kita melewati SKPD Dinas Pendidikan harus berupaya menyiapkan sarana prasarana yang ada didesa terkait dengan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dampak positif tadi harapan kita ya tersedianya sarana prasarana dalam kontek pembangunan yang menjadi hambatan selama ini sepertinya saya mengulang kembali ya terutama untuk perumahan dinas untuk guru ya memang masih kurang, karena jumlah guru dengan sarana tempat tinggal masih kurang sedikit perlu dibangun kembali yang baru, dengan kemungkinan juga rehab-rehab bangunan yang lama baik rehab total idak terlalu total sehingga pasilitas untuk guru tersedia. Harapan</p>	
--	--	---	--

		<p>kita dengan tersediaan ini melalui kegiatan ini jadi nampaknya nanti untuk bidang pendidikan eee masyarakat merasa terlayani dan mereka bisa aktif dalam melaksanakan sekolah di tempatnya tidak ketempat yang lain atau tidak sekolah sama sekali karena baik dari tenaga guru maupun sarana sekolah jadi harapan kita main set dari masyarakat akan meningkat. Begitu juga dengan bidang kesehatan, ya selama ini kami pantau melalui program ini masyarakat sangat mengharapkan ya pelayanan kesehatan itu eee sangat baik, artinya baik dari fasilitas yang ada disana maupun tenaga medis yang berada disana. Kondisi selama ini memang kita akui untuk tenaga medis sudah ada disana cuman hanya saja pada hari-hari tertentu mungkin tidak berada ditempat sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan berobat. Makanya pemerintah daerah juga menekankan konsekuensi selama bertugas disana kita imbangi dengan berbagai fasilitas rumah dinas supaya iya hidup sehari-hari disana menyatu dengan masyarakat dan melayani masyarakat. Pelayanan kesehatan melalui program pemerintah daerah juga ada program jamkesmas yang kita laksanakan sosial masyarakat yang untuk kesehatan gratis, jadi selain pelayanan yang melewati program SKPD, mungkin datang kesana lalu melakukan pengobatan gratis juga dalam masyarakat berobat yang ada di pustu desa mereka datang pun dilayani gratis terkait dengan itu</p>
--	--	---

		<p>jadi harapan kita dengan program ini pelayanan kesehatan lebih meningkat lagi. Hasil kondisi lapangan kita ketahui bersama bahwa aspek kesehatan ini bagian kebutuhan besar dari masyarakat yang harus kita penuhi. Dampaknya paling tidak ada peningkatan dari segi pelayanan maupun sarana prasarana yang disiapkan baik puskesmas, polindes, maupun sampai dengan posyandunya untuk bidang kesehatan. Jadi beberapa contoh saja selain program-program yang lain.</p>	
<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Lidan Hoder, S.Pd)</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Begini pak saya ingin menanyakan terkait penelitian saya tentang Implementasi PM2L di Desa Sungai Mentawa, sebelum rencana aksi program masuk desa, apakah ada sosialisasi? 2. Ya ada sosialisasi, dan masyarakat desa mengetahui bantuan tersebut dari program PM2L, sebelum dilaksanakan kegiatan begitu diprogramkan rencana aksi PM2L mereka sudah diberitahukan dan program ini tidak asing lagi. 3. Memasuki pertanyaan yang kedua pak, bagaimana koordinasi dengan unit satuan? 4. Selalu dirapatkan yang disponsori, yang dikomandani dari sekretariat daerah, eee...Badan PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh Bapak Bupati jadi selalu dievaluasi dan selalu dirapatkan. Jadi ada time scedul yang diberi oleh pemerintah daerah. Selalu rapat, evaluasi dinas badan sampai dimana kegiatan dan terakhir rapat evaluasi. 5. Yang keempat pak, Apa dasar 	

		<p>penentuan rencana aksi kegiatan ke desa program sasaran dari instansi bapak? maksudnya sebelum penentuan rencana aksi itu eee....penetapannya itu pak, kegiatan apa-apa saja?</p> <p>6. Ini kita melihat ya, masing-masing SKPD itu melihat kekurangan dan kelebihan desa-desa itu yang harus kita bantu. Jadi desa-desa mendapat program PM2L ini ada kriteria oh ini bisa dibantu karena desa ini agak lamban walaupun dia tidak tertinggal dari desa lain. Terutama yang difokuskan desa tertinggal kan, tetapi desa tertinggal kita tidak banyak lagi karena kriteria desa tertinggal kan ada. Tapi yang jelasnya desa yang agak kurang kreatif dari pada desa-desa lainnya, baik aparatur maupun masyarakatnya yang harus di dorong. PM2L bukan hanya program sendiri tetapi program dinas terkait. Jadi termasuk memberikan, apa namanya memberikan penyuluhan-penyuluhan, pembinaan-pembinaan itu.</p> <p>7. Lanjut pertanyaan kelima pak apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam program PM2L?</p> <p>8. Nah penghambatnya...eee, masih kurang kesadaran masyarakat terhadap kegotong royongan, kan terkenal masyarakat indonesia ini dari nenek moyang kegotong royongan jadi kelihatan agak luntur, terkikis, tergerus dengan budaya karena mendapat bantuan dari pemerintah seolah-olah masyarakat itu tidak terlalu pro aktif untuk membangun, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa itu yang saya</p>
--	--	---

		<p>lihat jelas. Apabila masyarakat desa itu sadar akan manfaat partisipasi masyarakat desa, mungkin desa itu tidak tertinggal dan lamban perubahannya itu kendalanya artinya masyarakat kurang berpartisipasi agak masih lemah.</p> <p>9. Kalau sumber dananya pak darimana pak?</p> <p>10. Dananya dari masing-masing SKPD, jadi SKPD menganggarkan dan program bekerja.</p> <p>11. Oke pak terima pak atas informasinya dan atas bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p>Kepala Dinas Kesehatan (dr. Yosef Romouw)</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau</p>	<p>1. Terima kasih atas kesempatan yang bapak berikan tujuan kedatangan saya kesini yaitu untuk wawancara dengan bapak hubungannya dengan tesis penelitian saya yaitu implementasi kebijakan PM2L di desa sungai mentawa. Kedatangan saya ini untuk mewawancarai bapak meminta data-data kepada bapak. Kita masuk ke pertanyaan pertama, Apakah sebelum program PM2L masuk ke desa sasaran ada sosialisasi?</p> <p>2. Sosialisasi diawali oleh puskesmas wilayah kerja sungai mentawa, sosialisasi waktu kegiatan imunisasi atau pusling.</p> <p>3. Baik pak, masuk ke pertanyaan ke 2, Bagaimana koordinasi dengan instansi terkait pak? Maksudnya sebelum rencana aksi itu dilaksanakan, apakah koordinasi antara badan dinas terkait pak?</p> <p>4. Ada, yaitu rapat seluruh dinas badan yang dikoordinir oleh BPMD sebagai leading sektornya, kemudian dinas</p>	

		<p>badan membuat kegiatan sesuai dengan topoksi masing-masing.</p> <p>5. Lanjut ke pertanyaan ke 4 pak, Apa dasar penentuan rencana aksi kegiatan ke desa program sasaran dari instansi bapak?</p> <p>6. Yang menentukan desa sasaran berdasarkan SK Gubernur, Kegiatan kita berdasarkan tupoksi kita apa yang bisa kita laksanakan misalnya bisa kita laksanakan pelayanan kesehatan, penyuluhan kesehatan, kemudian pengobatan itu aja. Bantuan fisik paling, apabila belum ada pustu kita bangun pustu, bagi yang belum ada polingdes kita bangun polingdes dan bagi yang belum ada posyandu kita bangun posyandu. Tetapi rata-rata desa yang terkena program PM2L sudah ada sarana prasarana fisik jadi kita tinggal memberikan sosialisasi dan pengobatan itu aja.</p> <p>7. Kita masuk ke pertanyaan ke 5, Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam program PM2L di desa sungai mentawa ini pak?</p> <p>8. Tidak ada penghambat, selain jaraknya dekat dan ada tenaga disana jadi tidak ada hambatannya.</p> <p>9. Ok pak masuk pertanyaan yang ke 6, Apakah dampak bagi masyarakat kelompok sasaran program PM2L dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pengembangan kemampuan masyarakat desa sungai mentawa, kebetulan disini yang saya lihat program dari dinas kesehatan adalah pelayanan dacil dan PHBS pak? Apa dampaknya program ini untuk masyarakat?</p>	
--	--	---	--

		<p>10. Dampaknya adalah untuk masyarakat memahami dan mengerti tentang PHBS itu, taulah PHBS itu?</p> <p>11. Tidak pak.</p> <p>12. PHBS itu adalah Pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu kita penyuluhan dengan penyuluhan itu masyarakat jadi memahami dan mengerti, misalnya mandi tiap hari 3 kali sehari, kalau ibunya hamil memeriksa kehamilannya minimal 4 kali dalam masa kehamilannya, kemudian gizi seimbang jadi masyarakat tau tentang gizi, terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kemudian tentang lingkungan ya, kebersihan lingkungan masing-masing itu PHBS.</p> <p>13. Kalau pelayanan dacin itu pak?</p> <p>14. Pelayanan dacin yaitu pelayanan desa terpencil, kita fokuskan untuk desa-desa terpencil dan desa dalam program PM2L termasuk pengobatan gratis.</p> <p>15. Ok pak, terima kasih atas bantuannya dan kesempatan mau wawancara dengan saya.</p> <p>16. Datanya ada di Kasi Damkes, atau purwanto tetapi purwanto lagi cuti.</p> <p>17. Iya terima kasih pak.</p>	
<p>Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. (H. Ir. Sunarto, M.A.P)</p>	<p>Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.</p>	<p>1. Terima kasih pak atas kesempatannya untuk meluangkan waktu wawancara dengan saya, adapun maksud kedatangan saya hari ini adalah berkaitan dengan penelitian saya tentang implementasi kebijakan program PM2L di desa sungai mentawa, dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah SKPD yang ikut serta dalam rencana aksi PM2L, masuk pertanyaan pertama pak,</p>	

		<p>Apakah sebelum program PM2L masuk ke desa sasaran, ada sosialisasi pak?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ada sosialisasi, biasanya kita dikoordinasi oleh Bappeda untuk mensosialisasikan rencana aksi apa saja ke desa sasaran program PM2L. 3. Lanjut pak pertanyaan ke 2, Bagaimana koordinasi dengan unit satuan kerja terkait pak? maksudnya dengan Bappeda ada koordinasi? 4. Eee itu hal yg normatif karena memang Bappeda sebagai koordinasi dengan instansi terkait supaya program bermanfaat dan pada umumnya supaya berkaidah mengikuti rencana strategi kemudian RPJMD tahunan karena memang 5. itu menyangkut ijin-ijin kepala daerah berjalan sehingga SKPD ini setelah melihat patron-patron tadi maka kita terjemahkan dengan renstra SKPD sesuai topoksi kita yaitu mengenai Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Kita mendukung PM2L program mamangun tuntang mahaga lewu, setiap kita melaksanakan program kegiatan di dahului dengan sosialisasi. 6. Terima kasih pak, untuk pertanyaan yang ke 3, program PM2L aksi apa saja dari instasi bapak yang masuk ke dalam desa sungai mentawa? 7. Program itu di dapat dari usulan Rakorbang Kabupaten Lamandau di iringi dengan kemampuan kita. Sehingga kita kroscek lagi minat masyarakat itu apa? Contohnya pembukaan lahan tanpa bakar, memanfaatkan herbisida 	
--	--	--	--

		<p>mengolah tanah tanpa bakar itu.</p> <p>8. Ok pak kita lanjutkan lagi, pertanyaan yang selanjutnya, eee..Apakah faktor penghambat yg di hadapi di dalam implementasi program ke sungai mentawa? Maksudnya faktor penghambat penyaluran kegiatan tersebut pak?</p> <p>9. Iya, jadi pasti faktor penghambatnya sedikit aja. Tidak mudah merubah mainset atau pola pikir khususnya masyarakat setempat, oleh karena itu kita coba program yang sederhana dulu jadi sebelum kita memberikan teknologi yang maju atau yang modern. Contohnya mekanisasi traktor yang canggih, kemudian indentifikasi tanaman pertanian. Sckarang yang mudah itu ternak sapi, kambing dan babi. Kalau mereka tertarik babi ya kita kasih babi, kalau mereka mau kambing atau sapi kita kasih sesuai keinginan mereka. Kenapa di desa tamiang dan sekitarnya tidak kita kembangkan sawah? Karena masyarakat belum bisa kita buka sawah tersebut karena belum terbiasa. Kita ikuti alur tradisional mereka. Itulah untuk merubah sikap dan prilaku mereka itu tidak gampang, perlu waktu dan proses jaman berjalan.</p> <p>10. Lanjut pak, apakah dampak bagi masyarakat sasaran program PM2L ini dari segi pendapatan pak?</p> <p>11. Oh pasti, kalau ternak tentunya kita ingin mengajak mereka agar ternak itu eee.. bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung. Langsungnya mereka bisa mengembangkan ternak itu</p>	
--	--	--	--

		<p>ada hasil anakan. Bisa di konsumsi daging nya maupun dikembangbiakan bisa meningkatkan ekonomi di jual kan jadi duit. Kemudian secara tidak langsung tadi kotoran sapi itu akan memenuhi kebutuhan pupuk masyarakat baik untuk kebun dan pertanian secara tidak langsung mereka menekan kebutuhan pupuk anorganik sebesar 40 %, nah di situ lah akan berdampak kesuburan dan masyarakat berterima kasih sekali walaupun tidak di kelola secara modern bahwa pupuk ini bisa di gunakan untuk tanaman sehingga terjadi hubungan dualisme yang baik. Yang ke 2 menambah ekonomi bisa menjadi kebutuhan hidup, membiayai anak sekolah dan kebutuhan sehari hari.</p> <p>12. Ok pak terima kasih atas bantuan dan informasinya.</p>	
<p>Sekretaris PU (E.A. Johnny Joa, A.Pi, M.Si)</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum</p>	<p>1. Siang pak, kedatangan saya kesini untuk wawancara bapak sebagai instansi terkait dalam penelitian saya, kebetulan penelitian saya Implementasi terkait kebijakan PM2L salah satunya PU dalam program ini pak, kita masuk ke pertanyaan pertama pak. Apakah sebelum program PM2L masuk desa ada sosialisasi?</p> <p>2. Iya memang sebelum program PM2L dilaksanakan terlebih dulu kita laksanakan sosialisasi dulu. Jadi, ke desa-desa yang melaksanakan desa PM2L</p> <p>3. Untuk yang kedua pak, bagaimana koordinasi dengan unit kerja terkait pak</p> <p>4. Kita lakukan awal melalui kegiatan, rapat instansi terkait kita koordinasi degan kepala daerahkita menyampaikan</p>	

		<p>kemajuan kegiatan masing-masing desa disampaikan ke pemerintah Kalimantan Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Masuk ke pertanyaan ketiga pak, Program PM2L kegiatan aksi apa saja dari Instansi PU ke desa Sungai mentawa? 6. Infrastruktur fisik ke desa kita kumpulkan dana didalam desa juga 7. Lanjut yang keempat, apa dasar penentuan rencana aksi kegiatan di PU ini pak? 8. Saya langsung ke lokasi ke desa Mentawa kemudian kita berkonsultasi dengan kepala desa setempat supaya kegiatan ini mencapai sasaran. 9. Jadi yang dibutuhkan oleh desa direncanakan ya? 10. Betul. 11. Kita lanjut ke pertanyaan kelima, apakah faktor penghambat yang dihadapi dalam Implementasi masuk desa? 12. Penghambatnya cuaca atau terjadinya banjir itu hambatan yang terbesar tapi dari satuan kami masih bisa kita atasinya. Kira-kira curah hujannya gak tera 13. Masuk ke pertanyaan ke enam. Apakah dampak bagi masyarakat bagi masyarakat PM2L bagi pendidikan dan pengembangan. 14. Mengurangi kondisi pasang atau banjir, dari kesehatan dapat kita atasi. 	
<p>Sekretaris Camat Bulik (M. Syaifudin Zuhri, S.E, M.A.P)</p>	<p>Kantor Camat Bulik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimakasih, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apakah sebelum Program PM2L masuk kedesa. 2. Pertanyaan pertama, apakah sebelum proram PM2L masuk desa ada sosialisasi? 3. Kalau sosialisasi pernah dilaksanakan, ini ada upaya dari 	

		<p>pihak provinsi untuk membentuk rencana PM2L kemudian diundang dan dilatih di Palangkaraya. Untuk diundang dalam rangka Program PM2L</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pertanyaan kedua, bagaimana koordinasi dengan unit satuan kerja terkait? 5. Unit satuan kerjanya, Koordinasi ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita diundang untuk mengetahui bahwa kita, karena salah satu desa di sungai metawa tertinggal, oleh bapak bupati rencana aksi masing-masing desa pada saat ada rapat koordinasi, koordinasi ini dilaksanakan. 6. Disektonya pak? 7. Kalau disektor di pemberdayaan desa dan masyarakat didesa Lamandau. 8. Jadi untuk program untuk kecamatan bulik ini khusus alokasi PM2L jadi kita sebagai kecamatan yang dinas badan atau instansi yang terkait, kita sekedar memfasilitasi. 9. Apa faktor penghambat yang dihadapi? 10. Komunikasi antara dinas instansi pada saat melaksanakan rencana aksinya tidak ada komunikasi ke kecamatan setelah melaksanaka. ke desa mentawa mereka tidak melaporkan apa yang sudah dilaksnaakan, timbul timbul kita tidak tahu bahwa ada bantuan dari provinsi, jadi mereka selonong saja memberikan bantuan dari provinsi. 11. Lanjut ke pertanyaan nomor enam, apakah dampak bagi masyarakat PM2L dari aspek pendidikan, kesehatan,
--	--	---

		pendapatan didesa sungai Mentawa. Maksudnya pengaruh dari program yang pernah ada ? 12. Sarana dan prasarananya pun lebih baik untuk kesehatan saya rasa ada peningkatan juga termasuk pendapat. Kemudian, eee ini khususnya desa sungai Mentawa ini tidak lagi jadi desa tertinggal setelah ada masuk PM2L sekarang kategorinya	
Warga Desa (Aliansyah warga RT.02)	Desa Sungai Mentawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka penelitian saya, ingin mengetahui dampak program PM2L di kehidupan masyarakat, masuk ke pertanyaan pertama pak, Apakah bapak mengetahui program PM2L ini masuk desa sungai mentawa? 2. Mengetahui aja pak. 3. Dari mana bapak mengetahui? 4. Program PM2L yang masuk itu yaitu jalan, ada alat ukir, alat untuk mebel dengan alat untuk bikin cetak batako dengan molennya. 5. Terus bapak tau bantuan itu dari PM2L dari mana? 6. Taunya dari orang-orang desa, bahwa bantuan itu katanya dari PM2L. 7. Berarti bapak mengetahui dari warga desa sungai mentawa ya pak? 8. Iya dari warga. 9. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 pak, Apakah bapak ikut serta dilibatkan dalam pelaksanaan program PM2L atau tidak pak? 10. Tidak ikut. 11. Kalau dapat bantuan pak? 12. Belum ada. 13. Apa dampak program PM2L itu menurut bapak? 14. Dampaknya tu belum ada pak. 15. Kalau gunanya bantuan program PM2L itu, ada gak pak? 	

		<p>16. Gunanya ada pak, misalnya jalan tempat masyarakat lalulang yang dulunya tu jalan hancur, becek, nah alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi karena di cor semen.</p> <p>17. Masuk pertanyaan yang ke 4 pak lah, Apakah bantuan program PM2L itu sesuai dengan keinginan masyarakat desa sungai mentawa?</p> <p>18. Sebenarnya yang ada ini sudah sesuai dengan harapan, cuman kalau bisa ditambah lagi di sektor pertanian berupa alat untuk pertanian. Kemaren ada bibit padi cuman tidak tau dari mana?</p> <p>19. Kalau sawah ada tidak pak di desa sungai mentawa?</p> <p>20. Sawah ada pak, bantuan dari pemerintah katanya seluas 40 Ha.</p> <p>21. Sawah tersebut masih digunakan pak?</p> <p>22. Sekarang tidak pak, cuman dulu saja pak waktu penggarapan pertama. Sekarang jalan menuju sawah sudah tertutup semak belukar jadi susah untuk dilewati lagi karena aktifitas ke sawah sudah tidak ada.</p> <p>23. Berarti setelah panen 1 kali terus sudah tidak dipakai lagi.</p> <p>24. Iya pak karena warga desa kita ini biasanya berladang berpindah-pindah itu yang tidak bisa dilepaskan.</p> <p>25. Baik terima kasih pak atas kesediaannya untuk wawancara kepada saya.</p> <p>26. Sama-sama pak.</p>	
--	--	---	--

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA
LEWU (PM2L)
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013**

LAPORAN

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

**RENCANA AKSI
PROGRAM MAMANGUN TUNTANG
MAHAGA LEWU (PM2L)
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013**

NO	KABUPATEN	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)
1	LAMANDAU	BELANTIKAN RAYA	KARANG BESI	20	21	APBD KAB	879.810.501
2	LAMANDAU	BULIK	SUNGAI MENTAWA	19	21	APBD KAB	879.810.501
3	LAMANDAU	LAMANDAU	KARANG TABA	20	21	APBD KAB	889.810.501
JUMLAH						2.649.431.503,-	

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

RENCANA AKSI
PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L)
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013

NO	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Belantikan Raya	Karang Besi	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sertifikasi tanah masyarakat	Peningkatan Administrasi Desa	APBD	110.750.000	BAG. ADPUM SETDA
2			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Pasca Panen	Terlaksananya Penyuluhan Pasca Panen di Desa PM2L	APBD	10.000.000	BPPKP
				Pencatatan Hasil Pangan di desa PM2L		APBD	2.000.000	BPPKP
3			Pembinaan Anak Terlantar	Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah	Terlaksananya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah.	APBD	20.000.000	DINSOSNAKERTRANS
4			Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Bantuan Sarana Usaha / Waserda Bagi Koperasi Didesa Pm2l	Terlaksananya Bantuan Sarana Bagi Koperasi Dan Umkm	APBD	10.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembentukan Koperasi Atau Pelatihan Administrasi Keuangan Koperasi Di Desa Pm2l	Terbinanya Dan Terbentuknya Koperasi Di Desa Pm2l	APBD	10.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
			Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Bantuan Peralatan Produksi Dan Pembentukan Kelompok Pengrajin Di Desa Pm2l	Terbentuknya Kelompok Pengrajin Dan Bantuan Mesin Produksi Pada Ikm Di Desa Pm2l	APBD	25.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
5			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	Pembangunan Pasar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat	Terlaksananya Rehap Rumah Rumah Warga Miskin	APBD	100.000.000	BPMDes
6			Penataan Administrasi Kependudukan	Partisipasi Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Program PM2L	Masyarakat memiliki Dokumen Kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Akte Kematian)	APBD	14.666.667	DISDUKCAPIL
					Di Desa memiliki data yang tersaji di Kantor desa			DISDUKCAPIL
					Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memiliki Dokumen Kependudukan			DISDUKCAPIL
7			PM2L Bidang Kesehatan	Pelayanan Dacil dan Penyuluhan PHBS	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	APBD	10.000.000	DINKES
8			Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Rumah Dinas Guru	APBD	100.000.000	DIKJAR

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

NO	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
9			Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	APBD	27.733.334	DISPORA
10			Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	APBD	32.929.167	KESBANG POL
11			Program PM2L Tahun 2012	Pembangunan Bibit Karet	Terlaksananya Pembangunan Bibit Karet	APBD	8.333.000	DISHUTBUN
12			Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebun, produk pertanian	Sapas PLTB Pendukung PM2L	APBD II	25.000.000	DISTANAKAN
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Temak Babi	APBD II	75.000.000	DISTANAKAN
13			Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah PM2L	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah PM2L	APBD II	17.500.000	DPPKAD
			Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Pelatihan, Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Terwujudnya Aparatur Desa yang memahami tata cara Pengelolaan Aset Daerah /Kekayaan Desa.	APBD II	24.993.333	DPPKAD
14			Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal	Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal Pada Lokasi PM2L	Pembanguna Drainase Panjang Kurang Lebih 385 M dan Gorong - Gorong 3 Buah	DAU	200.000.000	Dinas PU
15			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana Persampahan (PM2L)	Tersedianya sarana pengangkut sampah dan tempat sampah di Desa PM2L	APBD	19.500.000	BLH
16			Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitas Kegiatan PM2L	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan PM2L Penunjang Program Pemerintah Berjalan Lancar.	APBD	36.405.000	BAPPEDA
							879.810. 501	

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

NO	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Bulik	Sungai Mentaw	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sertifikasi tanah masyarakat	Peningkatan Administrasi Desa	APBD	110.750.000	BAG. ADPUM SETDA
2			Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Pasca Panen	Terlaksananya Penyuluhan Pasca Panen di Desa PM2L	APBD	10.000.000	BPPKP
				Pencatatan Hasil Pangan di desa PM2L		APBD	2.000.000	BPPKP
3			Pembinaan Anak Terlantar	Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah	Terlaksananya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah.	APBD	20.000.000	DINSOSNAKERTRANS
4			Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Bantuan Sarana Usaha / Waserda Bagi Koperasi Didesa Pm2l	Terlaksananya Bantuan Sarana Bagi Koperasi Dan Umkm	APBD	10.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembentukan Koperasi Atau Pelatihan Administrasi Keuangan Koperasi Di Desa Pm2l	Terbinanya Dan Terbentuknya Koperasi Di Desa Pm2l	APBD	10.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
			Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Bantuan Peralatan Produksi Dan Pembentukan Kelompok Pengrajin Di Desa Pm2l	Terbentuknya Kelompok Pengrajin Dan Bantuan Mesin Produksi Pada Ikm Di Desa Pm2l	APBD	25.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
5			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	Pembangunan Pasar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat	Terlaksananya Rehap Rumah Rumah Warga Miskin	APBD	100.000.000	BPMDes
6			Penataan Administrasi Kependudukan	Partisipasi Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Program PM2L	Masyarakat memiliki Dokumen Kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Akte Kematian)	APBD	14.666.667	DISDUKCAPIL
					Di Desa memiliki data yang tersaji di Kantor desa			DISDUKCAPIL
					Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memiliki Dokumen Kependudukan			DISDUKCAPIL
7			PM2L Bidang Kesehatan	Pelayanan Dacil dan Penyuluhan PHBS	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	APBD	10.000.000	DINKES

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

NO	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8			Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Rumah Dinas Guru	APBD	100.000.000	DIXJAR
9			Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	APBD	27.733.334	DISPORA
10			Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	APBD	32.929.167	KESBANG POL
11			Program PM2L Tahun 2012	Pembangunan Bibit Karet	Terlaksananya Pembangunan Bibit Karet	APBD	8.333.000	DISHUTBUN
12			Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebun, produk pertanian	Sapras PLTB Pendukung PM2L	APBD II	25.000.000	DISTANAKAN
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Ternak Babi	APBD II	85.000.000	DISTANAKAN
13			Pembinaan dan Fasilitasi engelolaan Keuangan Desa	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah PM2I	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah PM2I	APBD II	17.500.000	DPPKAD
			Pembinaan dan Fasilitasi engelolaan Keuangan Desa	Pelatihan, Penataan dan Pengelolaan Aset Desa PM2I	Terwujudnya Aparatur Desa Yang Memahami Tata Cara Pengelolaan Aset / kekayaan Desa	APBD II	24.993.333	DPPKAD
14			Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal	Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal Pada Lokasi PM2I	Pembanguna Drainase Panjang Kurang Lebih 397 M	DAU	200.000.000	DINAS PU
15			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana Persampahan (PM2L)	Tersedianya sarana pengangkut sampah dan tempat sampah di Desa PM2L	APBD	19.500.000	BLH
16			Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitas Kegiatan PM2L	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan PM2L Penunjang Program Pemerintah Berjalan Lancar.	APBD	36.405.000	BAPPEDA
							889.810.501,-	

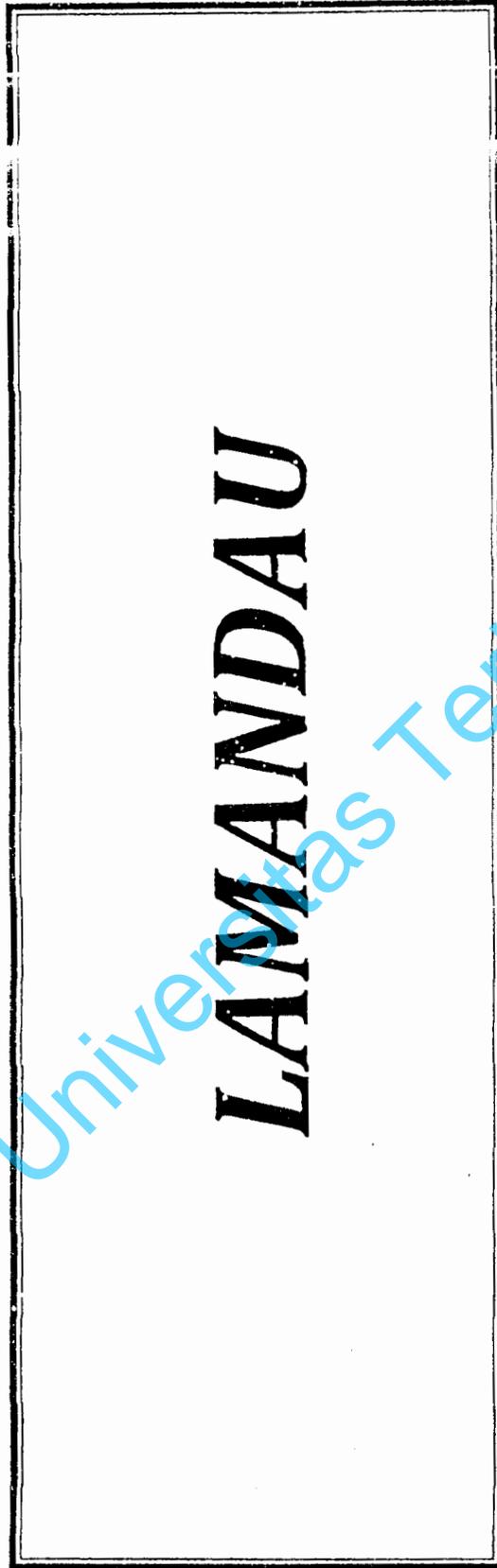
Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

NO	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8			Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah	Terpenuhinya Rumah Dinas Guru	APBD	100.000.000	DIKJAR
9			Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	Monitoring Kegiatan PM2L Tahun 2013.	APBD	27.733.334	DISPORA
10			Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kantibnas.	APBD	32.929.167	KESBANG POL
11			Program PM2L Tahun 2012	Pembangunan Bibit Karet	Terlaksananya Pembangunan Bibit Karet	APBD	8.333.000	DISHUTBUN
12			Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu produk perkebun, produk pertanian	Sapras PLTB Pendukung PM2L	APBD II	25.000.000	DISTANAKAN
			Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Ternak Babi	APBD II	75.000.000	DISTANAKAN
13			Pembinaan dan Fasilitasi engelolaan Keuangan Desa	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah PM2L	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah PM2L	APBD II	17.500.000	DPPKAD
			Pembinaan dan Fasilitasi engelolaan Keuangan Desa	Pelatihan, Penataan dan Pengelolaan Aset Desa PM2L	Terwujudnya Aparatur Desa Yang Memahami Tata Cara Pengelolaan Aset / kekayaan Desa	APBD II	24.993.333	DPPKAD
14			Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal	Pembangunan Infrastruktur Desa Tertinggal Pada Lokasi PM2L	Pembanguna Drainase Panjang Kurang Lebih 383 M dan Gorong - Gorong 1 Buah	DAU	200.000.000	DINAS PU
15			Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana Persampahan (PM2L)	Tersedianya sarana pengangkut sampah dan tempat sampah di Desa PM2L	APBD	19.500.000	BLH
16			Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitas Kegiatan PM2L	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan PM2L Penunjang Program Pemerintah Berjalan Lancar.	APBD	36.405.000	BAPPEDA
							879.810.501,-	

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.

NO	KEC.	DESA	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	SUMBER DANA	REALISASI (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Lamandau	Karang Taba	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sertifikasi tanah masyarakat	Peningkatan Administrasi Desa	APBD	110.750.000	BAG. ADPUM SETDA
2			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyuluhan Pasca Panen	Terlaksananya Penyuluhan Pasca Panen di Desa PM2L	APBD	10.000.000	BPPKP
				Pencatatan Hasil Pangan di desa PM2L		APBD	2.000.000	BPPKP
3			Pembinaan Anak Terlantar	Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah	Terlaksananya pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah.	APBD	20.000.000	DINSOSNAKERTRANS
4			Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Bantuan Sarana Usaha / Waserda Bagi Koperasi Didesa Pm2l	Terlaksananya Bantuan Sarana Bagi Koperasi Dan Umkm	APBD	10.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembentukan Koperasi Atau Pelatihan Administrasi Keuangan Koperasi Di Desa Pm2l	Terbinanya Dan Terbentuknya Koperasi Di Desa Pm2l	APBD	10.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
			Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial	Bantuan Peralatan Produksi Dan Pembentukan Kelompok Pengrajin Di Desa Pm2l	Terbentuknya Kelompok Pengrajin Dan Bantuan Mesin Produksi Pada Ikm Di Desa Pm2l	APBD	25.000.000	DISPERINDAGKOP DAN UMKM
5			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	Pembangunan Pasar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat	Terlaksananya Rehap Rumah Rumah Warga Miskin	APBD	100.000.000	BPMDes
6			Penataan Administrasi Kependudukan	Partisipasi Pelayanan Administrasi dan Koordinasi Program PM2L	Masyarakat memiliki Dokumen Kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Akte Kematian)	APBD	14.666.667	DISDUKCAPIL
					Di Desa memiliki data yang tersaji di Kantor desa			DISDUKCAPIL
					Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memiliki Dokumen Kependudukan			DISDUKCAPIL
7			PM2L Bidang Kesehatan	Pelayanan Dacil dan Penyuluhan PHBS	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	APBD	10.000.000	DINKES

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)
Kabupaten Lamandau Tahun 2013.



**REKOR ANA AKSI PM2L PROVINSI TAJURUN 2013
KABUPATEN LAMANDAU**

16/41849.pdf

NO.	Lokasi		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Tahapan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belantika Raya	Karang Besi	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Infrastruktur Pembuatan Jalan Setapak Cor Beton di Lokasi PM2L	1 Paket	APBD	300.000.000	I, II, III	Dinas Pekerjaan Umum
2	Bulik	Sungai Mentawa	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Infrastruktur Pembuatan Jalan Setapak Cor Beton di Lokasi PM2L	1 Paket	APBD	300.000.000	I, II, III	Dinas Pekerjaan Umum
3	Lamandau	Karang Taba	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Infrastruktur Pembuatan Jalan Setapak Cor Beton di Lokasi PM2L	1 Paket	APBD	300.000.000	I, II, III	Dinas Pekerjaan Umum
4	Belantika Raya	Karang Besi	Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana komunikasi dan informasi di desa sasaran PM2L (Laptop dan Printer)	APBD	10.000.000	II	Dinas Perhubungan dan Kominfo
5	Bulik	Sungai Mentawa	Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana komunikasi dan informasi di desa sasaran PM2L (Laptop dan Printer)	APBD	10.000.000	II	Dinas Perhubungan dan Kominfo
6	Lamandau	Karang Taba	Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana komunikasi dan informasi di desa sasaran PM2L (Laptop dan Printer)	APBD	10.000.000	II	Dinas Perhubungan dan Kominfo
7	Belantika Raya	Karang Besi	Pemberdayaan Masyarakat	Penempatan Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (Pemuda M2L)	1 orang	APBD	15.550.000	I, II, III, IV	Dinas Pemuda dan Olah Raga
8	Bulik	Sungai Mentawa	Pemberdayaan Masyarakat	Penempatan Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (Pemuda M2L)	1 orang	APBD	15.550.000	I, II, III, IV	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO.	LOKASI		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Triwulan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Lamandau	Karang Taba	Pemberdayaan Masyarakat	Penempatan Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (Pemuda M2L)	1 orang	APBD	15.550.000	I, II, III, IV	Dinas Pemuda dan Olah Raga
10	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan kebun desa/kelurahan seluas 2 Ha - Bibit karet 1000 batang - Pupuk NPK 200 Kg - Herbisida 10 liter - Hand sprayer 1 buah - Bantuan/Intensif 150 HOK	Terbangunnya Kebun Karet desa 2 Ha	APBD	23.400.000	I, II, III, IV	Dinas Perkebunan
11	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan kebun desa/kelurahan seluas 2 Ha - Bibit karet 1000 batang - Pupuk NPK 200 Kg - Herbisida 10 liter - Hand sprayer 1 buah - Bantuan/Intensif 150 HOK	Terbangunnya Kebun Karet desa 2 Ha	APBD	23.400.000	I, II, III, IV	Dinas Perkebunan
12	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pembangunan kebun desa/kelurahan seluas 2 Ha - Bibit karet 1000 batang - Pupuk NPK 200 Kg - Herbisida 10 liter - Hand sprayer 1 buah - Bantuan/Intensif 150 HOK	Terbangunnya Kebun Karet desa 2 Ha	APBD	23.400.000	I, II, III, IV	Dinas Perkebunan
13	Bulik	Sungai Mentawa	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dukungan PM2L	Meningkatnya pengetahuan dan ketertiban masyarakat dalam pengembangan hutan kemasyarakatan dan aneka usaha kehutanan (40 orang)	APBD	35.000.000	III	Dinas Kehutanan

1	Kecamatan	Desa/Kel.	Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Triwulan	Penanggung Jawab
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Lamandau	Karang Taba	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelatihan Keterampilan untuk kelompok usaha perempuan pada desa PM2L	10 orang anggota kelompok perempuan di desa yang terampil	APBD	10.050.000	II	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
15	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan	TKBK Kecamatan-Desa TKBK Kabupaten-Kecamatan TKBK Provinsi-Kabupaten Pemberian Alokasi Gratis	Peserta KB Baru Peserta KB Baru Peserta KB Baru PB dan PA	APBN APBN APBN APBN	80.000 1.500.000 3.450.000 3.500.000	II, III II, III II, III II, III	BKKBN
16	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan	TKBK Kecamatan-Desa TKBK Kabupaten-Kecamatan TKBK Provinsi-Kabupaten Pemberian Alokasi Gratis	Peserta KB Baru Peserta KB Baru Peserta KB Baru PB dan PA	APBN APBN APBN APBN	80.000 1.500.000 3.450.000 3.500.000	II, III II, III II, III II, III	BKKBN
17	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan	TKBK Kecamatan-Desa TKBK Kabupaten-Kecamatan TKBK Provinsi-Kabupaten Pemberian Alokasi Gratis	Peserta KB Baru Peserta KB Baru Peserta KB Baru PB dan PA	APBN APBN APBN APBN	80.000 1.500.000 3.450.000 3.500.000	II, III II, III II, III II, III	BKKBN
18	Belantika Raya	Karang Besi	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelatihan perencanaan pembangunan desa/kelurahan bagi kepala desa	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan pengetahuan desa/kelurahan bagi kepala desa	APBD	3.637.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
19	Belantika Raya	Karang Besi	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelatihan Pendampingan masyarakat bagi Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PM2L dalam pelayanan masyarakat	APBD	3.637.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
20	Belantika Raya	Karang Besi	Dana Stimulan	Bantuan mesin pemotong rumput	Membantu masyarakat dalam memelihara desa	APBD	2.500.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
21	Bulik	Sungai Mentawa	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelatihan perencanaan pembangunan desa/kelurahan bagi kepala desa	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan pengetahuan desa/kelurahan bagi kepala desa	APBD	3.637.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

NO.	LOKASI		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Triwulan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Bulik	Sungai Mentawa	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelatihan Pendampingan masyarakat bagi Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PM2L dalam pelayanan masyarakat	APBD	3.637.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
23	Bulik	Sungai Mentawa	Dana Stimulan	Bantuan mesin pemotong rumput	Membantu masyarakat dalam memelihara desa	APBD	2.500.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
24	Lamandau	Karang Taba	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelatihan perencanaan pembangunan desa/kelurahan bagi kepala desa	Meningkatnya kemampuan perencanaan dan pengetahuan desa/kelurahan bagi kepala desa	APBD	4.887.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
25	Lamandau	Karang Taba	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelatihan Pendampingan masyarakat bagi Pemuda Mamangun Tuntang Mahaga Lewu	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan PM2L dalam pelayanan masyarakat	APBD	4.887.000	I	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
26	Lamandau	Karang Taba	Dana Stimulan	Bantuan mesin pemotong rumput	Membantu masyarakat dalam memelihara desa	APBD	2.500.000	II	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
27	Bulik	Sungai Mentawa	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung keluarga miskin	Terwujudnya kelompok usaha bersama keluarga miskin 20 KK/2 kepala	APBD	40.000.000	I	Dinas Sosial
28	Belantika Raya	Karang Besi	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Pelatihan keterampilan produksi industri kecil	15 orang	APBD	32.225.000	I	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi antar daerah dalam upaya Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	Terwujudnya penyelenggaraan bimbingan teknis administrasi pemerintahan bagi sekretaris desa lokasi PM2L	APBD	650.000	IV	Biro Administrasi Pemerintahan Umum

NO.	Lokasi		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	T. wulan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi antar daerah dalam upaya Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	Terwujudnya penyelenggaraan bimbingan teknis administrasi pemerintahan bagi sekretaris desa lokasi PM2L	APBD	650.000	IV	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
31	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi antar daerah dalam upaya Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	Terwujudnya penyelenggaraan bimbingan teknis administrasi pemerintahan bagi sekretaris desa lokasi PM2L	APBD	650.000	IV	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
32	Belantika Raya	Karang Besi	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terselurnya dan terbayarnya bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke SDN Karang Besi	APBN	25.250.000	I, II, III, IV	Dinas Pendidikan
33	Bulik	Sungai Mentawa	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tesalur dan terbayarnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke SDN Sungai Mentawa	APBN	26.680.000	I, II, III, IV	Dinas Pendidikan
34	Lamandau	Karang Taba	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tesalur dan terbayarnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke SDN Karang Taba	APBN	26.680.000	I, II, III, IV	Dinas Pendidikan
35	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Mesin tik	Tersedianya 1 buah mesin tik	APBD	1.405.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
36	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Meja Baca	Tersedianya 1 buah Meja Baca	APBD	950.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
37	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Kursi Baca	Tersedianya 1 buah Kursi Baca	APBD	495.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
38	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Buku siap Layan	Tersedianya buku perpustakaan desa 1000 eks	APBN	23.500.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

NO.	Lokasi		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Tri vulan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan rak buku	Tersedianya 2 rak buku	APBN	3.300.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
40	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Bimtek tenaga pengelola perpustakaan desa PM2L	Tersedianya tenaga bimtek 1 orang	APBN	3.353.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
41	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Mesin tik	Tersedianya 1 buah mesin tik	APBD	1.405.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
42	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Meja Baca	Tersedianya 1 buah Meja Baca	APBD	950.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
43	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Kursi Baca	Tersedianya 1 buah Kursi Baca	APBD	495.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
44	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Euku siap Layan	Tersedianya buku perpustakaan desa 1000 eks	APBN	23.500.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
45	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan rak buku	Tersedianya 2 rak buku	APBN	3.300.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
46	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Bimtek tenaga pengelola perpustakaan desa PM2L	Tersedianya tenaga bimtek 1 orang	APBN	3.353.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
47	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Mesin tik	Tersedianya 1 buah mesin tik	APBD	1.405.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
48	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Meja Baca	Tersedianya 1 buah Meja Baca	APBD	950.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
49	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Kursi Baca	Tersedianya 1 buah Kursi Baca	APBD	495.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
50	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan Buku siap Layan	Tersedianya buku perpustakaan desa 1000 eks	APBN	23.500.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
51	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Pengadaan rak buku	Tersedianya 2 rak buku	APBN	3.300.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

NO.	Lokasi		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Triwulan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Lamandau	Karang Taba	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan	Bimtek tenaga pengelola perpustakaan desa PM2L	Tersedianya tenaga bimtek 1 orang	APBN	3.353.000	III	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
53	Belantika Raya	Karang Besi	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyebaran bibit Rambutan, Durian dan Manggis	- Bibit Rambutan 200 btg - Bibit Durian 200 btg - Bibit Manggis 200 btg	APBD	25.000.000	I, II	Dinas Pertanian dan Peternakan
54	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penyebaran bibit Rambutan, Durian dan Manggis	- Bibit Rambutan 200 btg - Bibit Durian 200 btg - Bibit Manggis 200 btg	APBD	25.000.000	I, II	Dinas Pertanian dan Peternakan
55	Bulik	Sungai Mentawa	Peningkatan Kesempatan Kerja (PPKK)	Pemanduan dan terapan TPK/Budidaya ayam broiler	Terlatihnya 20 orang Pencari kerja/Masyarakat setempat dalam bidang budidaya ternak ayam broiler	APBD	100.000.000	II, III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
56	Belantika Raya	Karang Besi	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan Bahan Seragam untuk Kader Posyandu Pengadaan UKS KIT Sumber Daya Masyarakat Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Terpencil	Tersedianya bahan seragam untuk kader posyandu	APBD	1.189.048	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
					Tersedianya UKS KIT	APBD	1.190.476	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
					Tersedianya Insentif bagi Nakes daerah terpencil	APBD	6.000.000	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
57	Bulik	Sungai Mentawa	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan Bahan Seragam untuk Kader Posyandu Pengadaan UKS KIT Sumber Daya Masyarakat Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Terpencil	Tersedianya bahan seragam untuk kader posyandu	APBD	1.189.048	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
					Tersedianya UKS KIT	APBD	1.190.476	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
					Tersedianya Insentif bagi Nakes daerah terpencil	APBD	6.000.000	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
58	Lamandau	Karang Taba	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pengadaan Bahan Seragam untuk Kader Posyandu Pengadaan UKS KIT Sumber Daya Masyarakat Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Terpencil	Tersedianya bahan seragam untuk kader posyandu	APBD	1.189.048	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
					Tersedianya UKS KIT	APBD	1.190.476	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
					Tersedianya Insentif bagi Nakes daerah terpencil	APBD	6.000.000	I, II, III, IV	Dinas Kesehatan
59	Belantika Raya	Karang Besi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penyuluhan Perkoperasian	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian (25 orang)	APBD	4.761.905	II	Dinas Koperasi dan UMKM

NO	Lokasi		Program	Kegiatan	Output	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	Triwulan	Penanggung Jawab
	Kecamatan	Desa/Kel.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Belantika Raya	Karang Besi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi Perkoperasian	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, melalui pendampingan pembina	APBN	3.309.048	II	Dinas Koperasi dan UKM
61	Belantika Raya	Karang Besi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penyediaan 16 buku administrasi perkoperasian	Tersedianya 16 buku administrasi perkoperasian	APBN	400.000	II	Dinas Koperasi dan UKM
62	Bulik	Sungai Mentawa	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penyuluhan Perkoperasian	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian (25 orang)	APBD	4.761.905	II	Dinas Koperasi dan UKM
63	Bulik	Sungai Mentawa	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi Perkoperasian	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, melalui pendampingan pembina	APBN	3.309.048	II	Dinas Koperasi dan UKM
64	Bulik	Sungai Mentawa	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penyediaan 16 buku administrasi perkoperasian	Tersedianya 16 buku administrasi perkoperasian	APBN	400.000	II	Dinas Koperasi dan UKM
65	Lamandau	Karang Taba	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penyuluhan Perkoperasian	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian (25 orang)	APBD	4.761.905	II	Dinas Koperasi dan UKM
66	Lamandau	Karang Taba	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi Perkoperasian	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian, melalui pendampingan pembina	APBN	3.309.048	II	Dinas Koperasi dan UKM
67	Lamandau	Karang Taba	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penyediaan 16 buku administrasi perkoperasian	Tersedianya 16 buku administrasi perkoperasian	APBN	400.000	II	Dinas Koperasi dan UKM
							1.601.657.431		



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/192/2012

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI
PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L)
DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013-2015 ✓

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan desa/kelurahan tertinggal dengan mensinergikan program pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat di Kalimantan Tengah. ✓
 - b. bahwa untuk pelaksanaan PM2L Tahun 2013-2015 perlu ditetapkan lokasi desa/kelurahan terpilih dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah. ✓
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah; ✓
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; ✓
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; ✓
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; ✓
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; ✓
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; ✓
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; ✓
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota; ✓
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. ✓
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; ✓
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2001 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. ✓

- 2 -

Memperhatikan : Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Desa/kelurahan lokasi PM2L di Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penanganan pembangunan desa/kelurahan terpilih tersebut melalui PM2L di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 9 Mei 2012

AGUSTIN TERAS NARANG

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI, di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
4. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya
Up. a. Kepala Biro Keuangan dan Aset
b. Kepala Biro Hukum
6. Semua Kepala Dinas/Badan Unit Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
7. Semua Kepala Dinas/Badan Unit Satuan Kerja Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

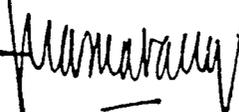
NO. 108 : 158.44/192/2012

TANGGAL : 9 Mei 2012

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel. (2013)
1.	Lamandau	Beratinkan Raya	Karang Besi
		Bulik	Sungai Mentawa
		Lamandau	Karang Taba
2.	Sukamara	Balai Riam	Pempaning
		Sukamara	Petarikan
		Permata Kecubung	Semantun
3.	Kotawaringin Barat	Arut Utara	1. Panahan 2. Sei Dau
		Kumai	Teluk Pulai
4.	Seruyan	Suling Tambun	1. Rantau Betung 2. Tumbang Salau
		Seruyan Hulu	Mojang Baru
5.	Kotawaringin Timur	Antang Kalang	Tumbang Ramei
		Mentaya Hulu	Penda Durian
		Bukit Santuai	Tumbang Kania
6.	Katingan	Petak Malai	Tumbang Jala
		Marikit	Tumbang Mandurei
		Sanaman Mantikei	Kuluk Habuhus
7.	Gunung Mas	Damang Batu	1. Tumbang Anoi 2. Karetan Sarian
		Miri Manasa	Tumbang Masukih
8.	Palangka Raya	Rakumpit	1. Petuk Barunai 2. Petuk Bukit
		Sabangau	Sabaru
9.	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Cemantan
		Sebangau Kuala	Paduran Mulia
		Kahayan Hilir	UPT Anjir Pulang Pisau
10.	Kapas	Mandau Talawang	Tumbang Bukoi
		Mantangai	Katunjung
		Kapas Kuala	Palampai

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel. (2013)
11.	Barito Selatan	Dusun Utara	Hilang
		Karau Kuala	Muara Arai
		Dusun Selatan	Tetei Lanan
12.	Barito Timur	Dusun Tengah	Sumber Garunggung
		Karusen Janang	Ipu Mea
		Dusun Timur	Pulau Patai
13.	Barito Utara	Teweh Timur	1. Muara Wakat 2. Liang Buah 3. Benangin III
14.	Murung Raya	Permata Intan	1. Sungai Gula 2. Sungai Bakanon 3. Tumbang Salio

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NO. SKRIPSI : 183/001/2012
TANGGAL : 9 Mei 2012

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel. (2014)
		Matang Kawa	Liku
		Belantikan Raya	1. Benuatan 2. Nanga Matu
2.	Sukamara	Permata Kecubung	Laman Baru
3.	Kotawaringin Barat	Arut Utara	1. Riam 2. Kerabu
		Kumai	Sei Cabang
4.	Seruyan	Seruyan Hulu	1. Buntut Sapau 2. Tumbang Sepan
		Suling Tambun	Tanjung Tukal
5.	Kotawaringin Timur	Cempaga Hulu	Selucing
		Mentaya Hulu	Pahirangan
		Parenggean	Tumbang Mujam
6.	Katingan	Katingan Hulu	Tumbang Sabetung
		Bukit Raya	Tumbang Karuei
		Marikit	Tumbang Bemban
7.	Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan
		Manuhing Raya	Tumbang Oroi
		Rungan	Bereng Malaka
8.	Palangka Raya	Bukit Batu	1. Tumbang Tahai 2. Banturung 3. Habaring Hurung
9.	Pulang Pisau	Banama Tingang	Manen Kaleka
		Sebangau Kuala	Sebangau Jaya
		Jabiren Raya	Garong
10.	Kapuas	Dadahup'	Tambak Bajai
		Mandau Talawang	Tanjung Rendan
		Pasak Talawang	Kaburan

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel. (2014)
11.	Barito Selatan	Dusun Utara	Bantai Bambore
		Dusun Hilir	Damparan
		Dusun Selatan	Mangaris
12.	Barito Timur	Patangkep Tutui	Betang Nalong
		Raren Batuah	Tangkum
		Dusun Timur	Gumpa
13.	Barito Utara	Teweh Tengah	1. Sabuh 2. Liang Naga 3. Butong
14.	Murung Raya	Barito Tuhup Raya	1. Tumbang Baloi 2. Batu Tojah 3. Tumbang Bauh

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



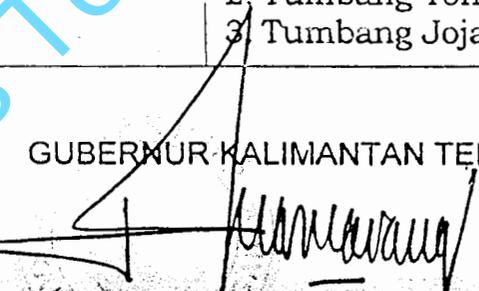
AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 188.44/192/2012
 TANGGAL : 9 Mei 2012

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel. (2015)
1.	Lamandau	Lamandau	Cuhai
		Batang Kawa	1. Jemuat 2. Ginih
2.	Sukamara	-	-
3.	Kotawaringin Barat	Arut Selatan	1. Tanjung Putri 2. Kenambul 3. Sulung
4.	Seruyan	Suling Tambun	1. Tumbang Hentas 2. Tumbang Magin
		Seruyan Hulu	Tusuk Belawan
5.	Kotawaringin Timur	Kota Besi	Simpur
		Mentaya Hulu	Tumbang Sapiri
		Pulau Hanaut	Satiruk
6.	Katingan	Katingan Hulu	Tumbang Salaman
		Sanaman Mantikei	1. Tumbang Pangka 2. Tumbang Atei
7.	Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian
		Tewah	Karason Raya
		Kurun	Tumbang Manyangan
8.	Palangka Raya	Jekan Raya	1. Bukit Tunggal 2. Menteng
		Pahandut	Pahandut
9.	Pulang Pisau	Banama Tingang	1. Tambak 2. Hurung
		Sebangau Kuala	Sei Hambawang
10.	Kapuas	Kapuas Hulu	Tumbang Puruh
		Mantangai	Tarantang
		Kapuas Barat	Sei Dusun

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel. (2015)
11.	Barito Selatan	Dusun Utara	Tamparak
		Gunung Bintang Awai	Muara Singan
		Karau Kuala	Tampijak
12.	Barito Timur	Awang	Tangkan
		Paku	Paku Beto
		Karusan Janang	Putut Tawuluh
13.	Barito Utara	Gunung Purei	1. Tanjung Harapan 2. Tambaba 3. Baik
14.	Murung Raya	Seribu Riam	1. Tumbang Naan 2. Tumbang Tohan 3. Tumbang Jojang

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/1110 / 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/192/2012 TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 - 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan desa/kelurahan tertinggal dengan mensinergikan program pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat di Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa desa lokasi PM2L yang telah ditetapkan setelah dilakukan identifikasi dan penetapan status desanya khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur dari semula desa tertinggal menjadi desa maju sehingga perlu mengubah/menganti Desa/Kelurahan lokasi PM2L;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/192/2012 Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

-2-

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40).

-3-

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/192/2012 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/302/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/192/2012 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi PM2L di Kalimantan Tengah Tahun 2013 - 2015 menjadi sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, beserta masyarakat dan stakeholders lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :
Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. a. Kepala Biro Keuangan;
b. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Kantor/Dinas/Badan Unit Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Kantor/Dinas/Badan Unit Satuan Kerja Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
7. Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Tengah.

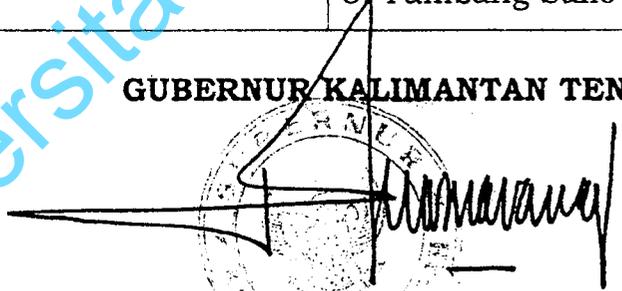
**DESA/KELURAHAN LOKASI PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU
(PM2L) DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan PM2L
1	2	3	4
1.	Lamandau	Belantikan Raya	Karang Besi
		Bulik	Sungai Mentawa
		Lamandau	Karang Taba
2.	Sukamara	Balai Riam	Pempaning
		Sukamara	Petarikan
		Permata Kecubung	Semantun
3.	Kotawaringin Barat	Arut Utara	1. Panahan 2. Sei Dau
		Kumai	Teluk Pulai
4.	Seruyan	Suling Tambun	1. Rantau Betung 2. Tumbang Salau
		Seruyan Hulu	Mojang Baru
5.	Kotawaringin Timur	Antang Kalang	Tumbang Ramei
		Mentaya Hulu	Penda Durian
		Bukit Santuai	Tumbang Kania
6.	Katingan	Petak Malai	Tumbang Jala
		Marikit	Tumbang Mandurei
		Sanaman Mantikei	Kuluh Habuhus
7.	Gunung Mas	Damang Batu	1. Tumbang Anoi 2. Karetan Sarian
		Miri Manasa	Tumbang Masukih
8.	Palangka Raya	Rakumpit	1. Petuk Barunai 2. Petuk Bukit
		Sabangau	Sabaru
9.	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Cemantan
		Sebangau Kuala	Paduran Mulia
		Kahayan Hilir	Hanjak Maju
10.	Kapuas	Mandau Talawang	Tumbang Bukoi
		Mantangai	Katunjung
		Kapuas Kuala	Palampai

-2-

1	2	3	4
11.	Barito Selatan	Dusun Utara	Hingan
		Karau Kuala	Muara Arai
		Dusun Selatan	Tetei Lanan
12.	Barito Timur	Dusun Tengah	Sumber Garunggung
		Karusen Janang	Ipu Mea
		Dusun Timur	Pulau Patai
13.	Barito Utara	Teweh Timur	1. Muara Wakat 2. Liang Buah 3. Benangin III
14.	Murung Raya	Permata Intan	1. Sungai Gula 2. Sungai Bakanon 3. Tumbang Salio

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

10 DESEMBER 2013

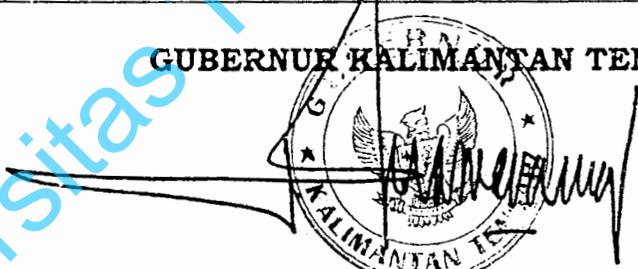
**DESA/KELURAHAN LOKASI PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU
(PM2L) DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014**

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN PM2L
1	2	3	4
1.	Lamandau	Batang Kawa	Liku
		Belantikan Raya	1. Benuatan 2. Nanga Matu
2.	Sukamara	Permata Kecubung	Laman Baru
3.	Kotawaringin Barat	Arut Utara	1. Riam 2. Kerabu
		Kumai	Sei Cabang
4.	Seruyan	Seruyan Hulu	1. Buntut Sapau 2. Tumbang Sepan
		Suling Tambun	Tanjung Tukal
5.	Kotawaringin Timur	Bukit Santuai	Tumbang Saluang
		Telaga Antang	Rantau Sawang
		Antang Kalang	Tumbang Hejan
6.	Katingan	Katingan Hulu	Tumbang Sabetung
		Bukit Raya	Tumbang Karuei
		Marikit	Tumbang Bemban
7.	Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan
		Manuhing raya	Tumbang Oroi
		Rungan	Bereng Malaka
8.	Palangka Raya	Bukit Batu	1. Tumbang Tahai 2. Banturung 3. Habaring Hurung
9.	Pulang Pisau	Banama Tingang	Manen Kaleka
		Sebangau Kuala	Sebangau Jaya
		Jabiren Raya	Garong
10.	Kapuas	Dadahup	Tambak Bajai
		Mandau Talawang	Tanjung Rendan
		Pasak Talawang	Kaburan
11.	Barito Selatan	Dusun Utara	Bantai Bambore
		Dusun Hilir	Damparan
		Dusun Selatan	Mangaris

-2-

1	2	3	4
12.	Barito Timur	Patangkep Tutui	Batang Nalong
		Raren Batuah	Tangkum
		Dusun Timur	Gumpa
13.	Barito Utara	Teweh Baru	Panaen
		Teweh Tengah	1. Datai Nirui 2. Beringin Raya
14.	Murung Raya	Barito Tuhup Raya	1. Tumbang Baloi
			2. Batu Tojah
			3. Tumbang Bauh

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

TANGGAL

16 DESEMBER 2015

**DESA/KELURAHAN LOKASI PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEW
(PM2L) DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan Program Mamangun tuntas Mahaga Lewu (PM2L) Tahun 2014
1	2	3	4
1.	Lamandau	Lamandau	Cuhai
		Batang Kawa	1. Jemuat 2. Ginih
2.	Sukamara	-	-
3.	Kotawaringin Barat	Arut Selatan	1. Tanjung Putri
			2. Kenambul
			3. Sulung
4.	Seruyan	Suling Tambun	1. Tumbang Hentas 2. Tumbang Magin
		Seruyan Hulu	Tusuk Belawan
5.	Kotawaringin Timur	Antang Kalang	Tumbang Ngahan
		Mentaya Hulu	Kapuk
		Bukit Santuai	Tumbang Sapia
6.	Katingan	Katingan Hulu	Tumbang Salaman
		Sanaman Mantikei	1. Tumbang Pangka 2. Tumbang Atei
7.	Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian
		Tewah	Karason Raya
		Kurun	Tumbang Manyangan
8.	Palangka Raya	Jekan Raya	1. Bukit Tunggal 2. Menteng
		Pahandut	Pahandut
9.	Pulang Pisau	Banama Tingang	1. Tambak 2. Hurung
		Sabangau Kuala	Sei Hambawang
10.	Kapuas	Kapuas Hulu	Tumbang Puruh
		Mantangai	Tanrantang
		Kapuas Barat	Sei Dusun

1	2	3	4
11.	Barito Selatan	Dusun Utara	Tamparak
		Gunung Bintang Awai	Muara Singan
		Karau Kuala	Tampijak
12.	Barito Timur	Awang	Tangkan
		Paku	Paku Beto
		Karusan Janang	Putut Tawuluh
13.	Barito Utara	Gunung Purei	1. Tanjung Harapan 2. Linon Besi I
		Lahei	Karendan
14.	Murung Raya	Seribu Riam	1. Tumbang Naan 2. Tumbang Tohan 3. Tumbang Jojang

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 138.44/79/2014.

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS DESA SANGAT TERTINGGAL, TERTINGGAL DAN MAJU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa seluruh desa sangat tertinggal dan tertinggal perlu mendapat perhatian pembangunan guna mempercepat keluar dari masalah ketertinggalan.
 - b. bahwa seluruh desa sangat tertinggal, tertinggal dan maju perlu ditetapkan statusnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai dasar pelaksanaan penanganan lebih lanjut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

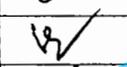
2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Strategi Nasional Pemcepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

MEMUTUSKAN :

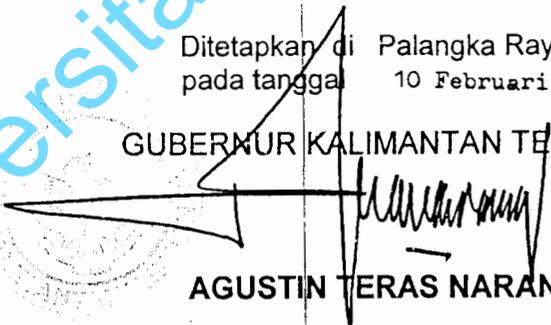
Menetapkan :

- KESATU** : Daftar nama desa sangat tertinggal, tertinggal dan maju di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa sangat tertinggal, tertinggal dan maju sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan usulan dari Kabupaten se Kalimantan Tengah dengan mengacu pada Panduan Perhitungan Desa Tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KETIGA** : Selanjutnya daftar desa sangat tertinggal, tertinggal dan maju sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dijadikan acuan dalam melakukan penanganan lebih lanjut oleh semua pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pejabat	Paraf
SEKDA	
Ka. BAPPEDA	
Ka. BPMPD	
Kabid Dukpem	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Februari 2014.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

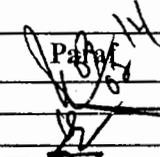
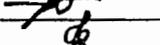
1. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI, di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
4. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.
5. Kepala Kantor/Dinas/Badan Unit Satuan Kerja lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
7. Kepala Kantor/Dinas/Badan Unit Satuan Kerja Kabupaten se Kalimantan Tengah.

Lampiran 1 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

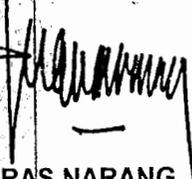
Nomor : 188.44/79/2014.
Tanggal : 10 Februari 2014.

Rekapitulasi Jumlah Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Maju
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

No.	Kabupaten	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Maju	Jumlah Desa
1.	Lamandau	0	7	73	80
2.	Sukamara	0	2	27	29
3.	Kotawaringin Barat	0	9	81	90
4.	Seruyan	0	20	63	83
5.	Kotawaringin Timur	0	16	151	167
6.	Katingan	0	45	109	154
7.	Gunung Mas	0	28	86	114
8.	Pulang Pisau	0	24	73	97
9.	Kapuas	0	59	155	214
10.	Barito Selatan	0	29	57	86
11.	Barito Timur	0	19	81	100
12.	Barito Utara	0	14	79	93
13.	Murung Raya	21	77	17	115
	TOTAL	21	357	1.058	1.436

Pejabat	
SEKDA	
Ka. BAPPEDA	
Ka. BPMPD	
Kabid Dukupem	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG